

**TUGAS AKHIR
(SKRIPSI)**

**"TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENANGANAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
KELURAHAN BARENG KOTA MALANG"**

**Dibuat Oleh
KHAZIMAH TUSYA'DAH
13.24.134**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

2017



LEMBAR PENGESAHAN

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGANAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN BARENG KOTA MALANG

Skripsi dipertahankan dihadapan Majelis Penguji Sidang Skripsi
Jenjang Strata Satu (S-1)

Pada Hari : Sabtu

Tanggal : 12 Agustus 2017

Diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Teknik

Disusun oleh:
Khatima Tusya'dah
13.24.134

Disahkan Oleh :

Penguji I

Ir. A. Nurul Hidayati, MTP

Penguji II

Ardianto M. Gat, ST, MSI

Penguji III

Annisa Hamidah I. ST, MSc

Mengetahui,
Ketua

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Ida Socwami, ST, MT
NIP. Y.1039 600 293



PERSETUJUAN SKRIPSI

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGANAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN BARENG KOTA MALANG

Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Teknik PWK S-1
Institut Teknologi Nasional Malang

Disusun oleh:
Khatima Tusya'dah
13.24.134

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT

Agung Witjaksono, ST, MT

Mengetahui,
Ketua
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Ida Socwami, ST, MT
NIP. Y. 1039/600 293



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khatimah Tusya'dah
Nim : 13.24.134
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Judul : Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan
Kualitas Permukiman Kumuh Kelurahan Bareng Kota
Malang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tugas akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari dapat dibuktikan bahwa tugas akhir ini adalah jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, Agustus 2017
Yang Membuat Pernyataan



Khatimah Tusya'dah
NIM. 13.24.134

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENANGANAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
KELURAHAN BARENG
KOTA MALAG**

Khatimah Tusya'dah
Dr. Ibnu Sasongko, Ir., MT
Agung Witjaksono, ST., MTP

Abstrak

Kelurahan Bareng merupakan salah satu permukiman kumuh dengan kategori tinggi yang berada di Kota Malang. Kelurahan dengan kumuh tinggi memiliki status lahan sebagian besar tidak jelas (illegal) dengan tingkat kepadatan penduduk sedang. Dengan adanya permukiman yang tidak layak huni perlu adanya perbaikan kualitas permukiman kumuh. Dimana dari program-program perbaikan permukiman yang berupa Program Sanitasi Berbasis Masyarakat, Program Bank Sampah, Perbaikan jalan dan Saluran Air, serta Pembuatan Sumur Injeksi. Dari berbagai macam penanganan tersebut perlu adanya partisipasi masyarakat untuk memberikan pengaruh dalam pembangunan sebuah kota.

Pengambilan data pada penelitian ini yaitu observasi lapangan menggunakan kuisioner dengan metode purposive sampling. Analisa yang digunakan untuk menganalisa bentuk partisipasi masyarakat yaitu deskriptif kualitatif, sedangkan untuk menganalisa tingkat partisipasi masyarakat menurut teori Arnstein menggunakan metode deskriptif statistik berupa skoring dan pembobotan, sehingga dari hasil analisa tersebut dapat mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada lokasi penelitian.

Dari hasil analisa yang telah dilakukan, bahwa dari setiap program-program penangan permukiman kumuh memiliki bentuk serta tingkat partisipasi masyarakat yang berbeda-beda. Dalam bentuk partisipasi berupa partisipasi ide berdasarkan hasil analisa bahwa hampir 100% masyarakat mengetahui informasi program-program penanganan permukiman kumuh. Sedangkan pada partisipasi yang sama yaitu pada tangga ke tiga yaitu menyampaikan informasi berupa sosialisasi dengan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat dan Program Bank Sampah, dimana masyarakat aktif dalam menghadiris sosialisasi pada penanganan tersebut.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Permukiman Kumuh, Penanganan Permukiman Kumuh

LEVEL OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HANDLING QUALITY OF SLUM KELURAHAN BARENG MALANG TOWN

Khatimah Tusya'dah
Dr. Ibnu Sasongko, Ir., MT
Agung Witjaksono, ST., MTP

Abstrack

Kelurahan Bareng is one of the category high slums in Malang Town. Kelurahan Bareng also has illegal land with the medium density of population. There is slum could not live by some people so that it must be there repaired quality of the slums. By the settlement improvement programs in the form of Community-Based Urban Sanitation Program, Gerbage Program, Repaired Roads and Waterways, and The Manufacture of Injection Wells. From various kinds of handling the need for community participation to give influence in the development of the city. Development that involves community participation is an important thing which community most knows or learns what is best for their environment.

Data collection in this research is field observation using questionnaire with purposive sampling method. The analysis used to analyze the form of participation according to Arnstein theory using statistical descriptive method in the form of scoring and weighting, so that the analysis can know the level of participation in the location of the research. From the results of the analysis that had been done, each slum settlement programs have different forms and levels of participation. In the form of ideas participation on the analysis that is 83% - 100% of respondents answered never gave suggestions and assessments of slum settlement programs. What is meant by the same program is the program of Community Based Urban Sanitation and Waste Bank Program, where the community is active in presenting the socialization on the train.

Key Words: Participate Of Community, Slum, Handling Of Slum

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Bareng, Kota Malang” .

Masalah permukiman kumuh di Kota-kota besar sangat memprihatinkan. Terutama masalah permukiman kumuh. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kawasan permukiman berkepadatan tinggi merupakan embrio permukiman kumuh. Permukiman kumuh yang ada di Kota Malang memiliki jumlah yang terbilang banyak.

Dalam penanganan permukiman kumuh sangat memerlukan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam sebuah program pembangunan yang dapat meningkatkan kehidupan dan lingkungan mereka baik dalam pengampilan keputusan, penyusunan program, dan pelaksanaan program tersebut.

Tahap demi tahap saya lewati dalam pengerjaan laporan ini dan saya berterimakasih kepada beberapa pihak yang membantu baik dalam bentuk moral ataupun moril dan memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan laporan ini. Adapun pihak-pihak yang membantu penyusunan tugas akhir ini :

1. Bapak DR. IR. Ibnu Sasongko, MT selaku pembimbing ke 1.
2. Bapak Agung Widjaksono, ST, MTP selaku pembimbing ke 2.
3. Kepada kedua orang tua yang telah memberikan doa dan semangat kepada kami untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik.
4. Dan tak lupa untuk semua teman-teman yang telah memberikan support selama ini.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pembaca memberikan kritik dan saran untuk tugas akhir ini, sehingga selanjutnya dalam penyusunan skripsi akan menjadi lebih baik lagi. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan sebaik-baiknya.

Malang, Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR BAGAN	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR PETA.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Sasaran	3
1.3.1 Tujuan	3
1.3.2 Sasaran	3
1.4 Ruang Lingkup.....	3
1.4.1 Ruang Lingkup Lokasi	3
1.4.2 Ruang Lingkup Materi	3
1.5 Keluaran dan Manfaat Yang Diharapkan	4
1.5.1 Keluaran Yang Diharapkan	4
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Pembahasan	5

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Partisipasi Masyarakat	10
2.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat	10
2.1.2 Tingkatan Partisipasi Masyarakat	12
2.1.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat	16
2.1.4 Pentingnya Partisipasi Masyarakat	17
2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	19
2.2 Teori Permukiman Kumuh	20
2.2.1 Pengertian Permukiman Kumuh.....	20
2.2.2 Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Permukiman Kumuh	21
2.2.3 Kondisi Kekumuhan Permukiman Kumuh Kelurahan Bareng	23
2.2.4 Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh	24
2.2.5 Penanganan Permukiman Kumuh	25
2.3 Sintesa Kajian Pustaka	29

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	31
3.2 Kebutuhan Data.....	31

3.3	Teknik Sampling	32
3.4	Tahapan Analisis	32
3.4.1	Identifikasi bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Bareng dalam penanganan permukiman kumuh.....	32
3.4.2	Merumuskan tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan kualitas permukiman kumuh	34

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1	Gambaran Umum Kota Malang	38
4.2	Gambaran Umum Kelurahan Bareng	38
4.3	Gambaran Umum Permukiman Kumuh Kelurahan Bareng	39
4.3.1	Kependudukan.....	39
4.3.2	Fasilitas Kelurahan Bareng	40
4.3.3	Kondisi Fisik Bangunan	40
4.3.4	Kondisi Lingkungan	41
4.4	Gambaran Umum Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Bareng.....	42
4.4.1	Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM)	43
4.4.2	Program Bank Sampah	44
4.4.3	Perbaikan Jalan dan Saluran Air (Drainase).....	45
4.4.4	Bedah Rumah	49
4.4.5	Sumur Injeksi	49
4.5	Gambaran Umum Partisipasi Masyarakat	51
4.5.1	Partisipasi Dalam Bentuk Ide	51
4.5.2	Partisipasi Dalam Bentuk Sumbangan Dana atau Harta Benda..	53
4.5.3	Partisipasi Dalam Bentuk Tenaga	54

BAB V HASIL ANALISA

5.1	Analisa Bentuk Partisipasi Masyarakat	56
5.1.1	Bentuk Partisipasi dalam Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat	56
5.1.2	Bentuk Partisipasi dalam Program Bank Sampah	57
5.1.3	Bentuk Partisipasi dalam Perbaikan Jalan dan Saluran Air (Drainase).....	58
5.1.4	Bentuk Partisipasi dalam Pembuatan Sumur Injeksi	60
5.2	Analisa Tingkat Partisipasi Masyarakat Menurut Teori Arnstein	61
5.2.1	Tingkat Partisipasi Pada Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM).....	61
5.2.1	Tingkat Partisipasi Pada Program Bank Sampah	63
5.2.2	Tingkat Partisipasi Pada Perbaikan Jalan dan Saluran Air (Drainase).....	64
5.2.3	Tingkat Partisipasi Pada Sumur Injeksi	66

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan69

6.2 Rekomendasi.....70

DAFTAR PUSTAKA71

LAMPIRAN.....73

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran.....	9
Bagan 3.1 Kerangka Kerja	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terbentuk Permukiman Kumuh	
Tabel 2. 2 Faktor-faktor Langsung Penyebab Kekumuhan	
Tabel 2. 3 Faktor-faktor Tidak Langsung Penyebab Kekumuhan	
Tabel 3. 1 Jumlah Penyebaran Kuisioner	
Tabel 3. 2 Variabel Amatan Bentuk Partisipasi Masyarakat	
Tabel 3. 3 Variabel Amatan Tingkat Partisipasi Masyarakat	
Tabel 3. 4 Skoring Tingkat Partisipasi	
Tabel 3. 5 Klasifikasi Penilaian Tingkat Partisipasi	
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Menurut RW Kelurahan Bareng	38
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir	38
Tabel 4. 3 Jumlah Sarana Umum di Kelurahan Bareng	39
Tabel 4. 4 Perbaikan Jalan	46
Tabel 4. 5 Partisipasi Dalam Bentuk Ide Dalam Penanganan Permukiman Kumuh	51
Tabel 4. 6 Partisipasi Dalam Bentuk Harta Benda Dalam Penanganan Permukiman Kumuh	53
Tabel 4. 7 Partisipasi Dalam Bentuk Tenaga Dalam Penanganan Permukiman Kumuh	55
Tabel 5. 1 Bentuk Partisipasi dalam Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat	56
Tabel 5. 2 Bentuk Partisipasi dalam Program Bank Sampah	57
Tabel 5. 3 Bentuk Partisipasi dalam Perbaikan Jalan dan Saluran Air (Drainase)	59
Tabel 5. 4 Bentuk Partisipasi dalam Kegiatan Sumur Injeksi	60
Tabel 5. 5 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat	61
Tabel 5. 6 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Bank Sampah	63
Tabel 5. 7 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perbaikan Jalan dan Saluran Air (Drainase)	65
Tabel 5. 8 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perbaikan Jalan dan Saluran Air (Drainase)	66
Tabel 5. 9 Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	4. 1 Rumah Tidak Layak huni RW 07	39
Gambar	4. 2 Kondisi Jalan Lingkungan di RW 8.....	40
Gambar	4. 3 Daerah yang menjadi lokasi banjir	41
Gambar	4. 4 Sosialisasi Pra Program SPBM.....	42
Gambar	4. 5 Tahap Pembangunan Program SPBM	42
Gambar	4. 6 Sosialisasi Pemeliharaan Sanitasi Oleh Tim IUWASH	42
Gambar	4.7 Kerajinan Hasil Sosialisasi Pembuatan Kerajinan Dari Sampah	43
Gambar	4. 8 Gudang Penyimpanan Sampah	44
Gambar	4. 9 Rumah Tidak Layak huni RW 07 RT 01	48
Gambar	4. 10 Sumur Injeksi	48
Gambar	4. 11 Gotong Royong Memperbaiki Drainase dan Pembuatan RTH.....	50
Gambar	4. 12 Kegiatan Gotong Royong Perbaikan Drainase	54

DAFTAR PETA

Peta 1.1 Orientasi Kelurahan Bareng	7
Peta 1.2 Lokasi Penelitian Permukiman Kumuh	8
Peta 4.1 Lokasi IPAL Komunal	45
Peta 4.2 Lokasi Perbaikan Jalan	47
Peta 4.3 Titik Lokasi Sumur Injeksi	49



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH dan KOTA S-1
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jln. Bendungan Sigura – Gura No.2, Malang – Jawa Timur

Telp. / Fax : (0341) 567154

**BERITA ACARA
SEMINAR KOMPREHENSIF**

Nama : Khatimah Tusya'dah
Nim : 13.24.134
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota (S-1)
Fakultas : Teknik Sipil dan Perencanaan
Judul : Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Kualitas Permukiman Kumuh Kelurahan Bareng Kota Malang
Hari, Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2017

Dosen Penguji	Petanyaan/ Saran	Keterangan/ Tanggapan	Tanda Tangan
Ir. Agustina Nurul Hidayati, MT	<ol style="list-style-type: none">Perbaiki Kesimpulan:<ul style="list-style-type: none">Rekomendasi – kaitkan dengan tingkat partisipasiKerangka tiap proses untuk menunjukkan proses dari tiap program penanganan permukiman kumuh	<ol style="list-style-type: none">Diperbaiki hal . 86Ditambahkan pada hal. 42,43,45,49.	
Ardiyanto M. GAI, ST, MSi	<ol style="list-style-type: none">Tambahkan kerangka pada setiap komponen programKesimpulan dipertajam	<ol style="list-style-type: none">Ditambahkan hal. 42,43,45,49 untuk gambaran umum dan untuk analisa hal. 70, 75, 79, 83Diperbaiki Hal. 86	
Annisa Hamidah I, ST, MSc	<ol style="list-style-type: none">Kenapa harus pakai berdasarkan teori Arnstein? Apa keistimewaannya?Pembahasan sampel per-RT?	<ol style="list-style-type: none">Teori Arnstein menjabarkan tingkat partisipasi masyarakat yang berdasarkan pada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat, sedangkan pada teori yang lain seperti teori ADB untuk mengukur partisipasi masyarakat pada aspek management dan ekonomi.Pembagian sampel per RT ini diambil karena memiliki ciri-ciri dimana ketu RT merupakan orang yang mengetahui banyak	



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH dan KOTA S-1
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jln. Bendungan Sigura – Gura No.2, Malang – Jawa Timur
Telp. / Fax : (0341) 567154

Dosen Penguji	Petanyaan/ Saran	Keterangan/ Tanggapan	Tanda Tangan
	3. Kaitan Sasaran 1 dan Sasaran 2?	tentang kegiatan penanganan permukiman yang dilakukan didaerah tempat tinggalnya. 3. Setelah bentuk partisipasi masyarakat diketahui diangkakan atau diberikan skoring menurut teori arnstein kemudian dihitung menggunakan rumus rata-rata sehingga dapat hasil dari tingkat partisipasi masyarakatnya.	

Malang, 19 Agustus 2017

Dosen Pembimbing 1

Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT

Dosen Pembimbing 2

Agung Witjaksono, ST, MT





**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH dan KOTA S-1
FAKULTAS TEKNIK SIPIL dan PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jln. Bendungan Sigura – Gura No.2, Malang – Jawa Timur
Telp. / Fax : (0341) 567154

**BERITA ACARA
SEMINAR HASIL**

Nama : Khatimah Tusya'dah
Nim : 13.24.134
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota (S-1)
Fakultas : Teknik Sipil dan Perencanaan
Judul : Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Kualitas Permukiman Kumuh Kelurahan Bareng Kota Malang
Hari, Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2017

Dosen Penguji	Pertanyaan/ Saran	Keterangan/ Tanggapan	Tanda Tangan
Annisa Hamidah I, ST, MSc	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaitan sasaran 1 dan sasaran 2 apa? 2. Teori yang dimasukkan yang dipakai saja? 3. Sasaran 1 adalah tabel kegiatan itu darimana? 4. Peta tingkat partisipasi masyarakat dispasialkan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada kaitannya, bahwa untuk menentukan sasaran kedua berupa tingkat partisipasi masyarakat perlu mengidentifikasi bentuk partisipasi terlebih dahulu. 2. Akan dilihat lagi. 3. Kegiatan tersebut berasal dari saya ambil sebagai contoh dari penanganannya permukiman kumuh, sebab untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat perlu diketahui program maupun kegiatan yang dilakukan dalam penanganannya. 4. Diterima, terdapat pada hal. 63, 66 dan 70. 	
Ardiyanto M. GAI, ST, MSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cek abstrak dan tata tulis 2. Keterkaitan antara sasaran 1 dan 2 tidak kelihatan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dicek dan diperbaiki. 2. Ada kaitannya, bahwa untuk menentukan sasaran kedua berupa tingkat partisipasi masyarakat perlu mengidentifikasi bentuk partisipasi terlebih dahulu. 	



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH dan KOTA S-1
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jln. Bendungan Sigura – Gura No.2, Malang – Jawa Timur
Telp. / Fax : (0341) 567154

Dosen Penguji	Petanyaan/ Saran	Keterangan/ Tanggapan	Tanda Tangan
	<ol style="list-style-type: none">3. Eksplora lagi analisis disetiap sasaran4. Setelah mengetahui tingkat akan diapakan?5. Sasaran 2 harusnya bisa dieksplora?	<ol style="list-style-type: none">3. Akan ditinjau kembali pada tiap sasaran yang ada.4. Setelah mengetahui tingkat akan mengetahui keikut sertaan masyarakat dalam mengetahui partisipasi masyarakat.5. Akan ditinjau kembali dan sasaran 2 dibuat sesuai dengan setiap tingkatannya. Hal 61, 62, 64, 65, 67, 68, dan 69	

Dosen Pembimbing 1

Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT

Malang, 19 Agustus 2017

Dosen Pembimbing 2



Agung Witjaksana, ST, MT



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH dan KOTA S-1
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
 Jln. Bendungan Sigura – Gura No.2, Malang – Jawa Timur
 Telp./ Fax : (0341) 567154

BERITA ACARA
SEMINAR PROPOSAL

Nama : Khatimah Tusya'dah
Nim : 13.24.134
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota (S-1)
Fakultas : Teknik Sipil dan Perencanaan
Judul : Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Kualitas Permukiman Kumuh Kelurahan Bareng Kota Malang
Hari, Tanggal : Kamis, 6 April 2017

Dosen Penguji	Petanyaan/ Saran	Keterangan/ Tanggapan	Tanda Tangan
Annisa Hamidah I, ST, MSc	1. Latar belakang kurang tajam. Jelaskan permasalahan yang didukung oleh data penunjang? 2. Variabel dan sintesa variabel di perjelas dan struktur 3. Sasaran I mengetahui tingkat partisipasi masyarakat tapi mengapa variabel yang keluar bentuk? 4. Cara menilai tingkat partisipasi bagaimana?	1. Diterima dan diperbaiki 2. Variabel dan sintesa telah diperbaiki 3. Untuk sasaran I sudah diganti dengan mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat 4. Untuk menilai tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat dengan tingkat kepentingannya, sehingga diberikan skor dari terendah ke tertinggi sesuai dengan karakter masing-masing tingkat partisipasi.	
Ardiyanto M. GAI, ST, MSI	1. Latar belakang dalam penanganan permukiman kumuh bagaimana dapat dipengaruhi dengan partisipasi masyarakat? Benang merah antara dua sasaran belum kelihatan, hanya dua sasaran saja, mungkin dapat ditambahkan	1. Untuk latar belakang telah diperbaiki	



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH dan KOTA S-1
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

Jln. Bendungan Sigura - Gura No.2, Malang - Jawa Timur
Telp. / Fax : (0341) 567154

Dosen Penguji	Petanyaan/Saran	Keterangan/Tanggapan	Tanda Tangan
Widyanto Hari S. W, ST, MSc	<ol style="list-style-type: none">Hipotesis itu seharusnya menguji tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap tingkat kekumuhanMetode dicek dan diperbaiki lagi disesuaikan dengan sasaran	<ol style="list-style-type: none">Untuk tingkat partisipasi tidak menggunakan hipotesis karena hanya mengidentifikasi partisipasi masyarakat dan merumuskan tingkat partisipasi masyarakatUntuk metode sudah disesuaikan dengan sasaran	
	<ol style="list-style-type: none">Sesuaikan antara teori Arnstein dengan jenis partisipasiSesuaikan jenis data dengan analisis korelasiJudul disesuaikan dengan output penelitian anda	<ol style="list-style-type: none">Untuk teori Arnstein dan jenis partisipasi telah disesuaikanUntuk metode tidak menggunakan analisis korelasi karena untuk sasaran II telah diubah menjadi merumuskan tingkat partisipasi masyarakatJudul telah disesuaikan dengan output penelitian	

Dosen Pembimbing 1

Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT

Malang, 5 Mei 2017

Dosen Pembimbing 2

Agung Witiaksono, ST, MT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permukiman kumuh merupakan permasalahan besar di setiap kota maju maupun berkembang. Kepadatan penduduk akibat urbanisasi mengakibatkan persoalan dalam keterbatasan lahan untuk tempat tinggal. Keterbatasan dan tingginya harga lahan menyebabkan penduduk menempati di permukiman padat dengan sanitasi buruk dan pelayanan yang kurang memadai.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi prasyarat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Dengan adanya permukiman yang tidak layak huni perlu adanya penanganan kualitas permukiman kumuh.

Penanganan permukiman kumuh dapat dilakukan dengan pendekatan partisipasi masyarakat (Adviyanti, 2016). Partisipasi adalah tindakan mengambil bagian dalam kegiatan, sedangkan pengertian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan dimana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan (Mubyarto, 1997) dalam Huraerah (2008: 96).

Kota Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang terletak pada posisi 112°37' 47,73" - 112°38' 44,01" Bujur Timur dan 7°56' 45,65"- 7°59'5.89" Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Malang sebesar 110,06 km² yang terbagi dalam lima kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing dan Lowokwaru. Jumlah penduduk Kota Malang berdasarkan data Penduduk yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sebanyak 865.011 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,58% serta angka kemiskinan yang masih tinggi sebanyak 5,20% atau 43.953 penduduk (Lakip 2014 Kota Malang). Peningkatan jumlah penduduk yang tinggi menimbulkan berbagai permasalahan terutama permasalahan lingkungan, salah satunya adalah munculnya permukiman-permukiman kumuh. Permukiman kumuh tersebut muncul dikarenakan peningkatan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan peningkatan daya tampung lingkungan dan juga keterbatasan ekonomi.

Pemerintah Kota Malang menetapkan luasan kawasan kumuh melalui Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/86/35.73.112/2015 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, dimana luasan kawasan kumuh di Kota Malang adalah seluas 608,60 Ha yang meliputi 29

Kelurahan pada 5 Kecamatan di Kota Malang. Salah satu kelurahan yang termasuk dalam kawasan kumuh yaitu Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen.

Kelurahan Bareng memiliki kondisi kekumuhan yang termasuk kedalam kategori kumuh berat. Kelurahan dengan kumuh berat memiliki status lahan sebagian besar tidak jelas (illegal) dengan tingkat kepadatan penduduk sedang (Wijaya, 2016: 6). Kelurahan Bareng memiliki luasan kawasan kumuh terluas dibandingkan dengan kelurahan lain yaitu seluas 81,56 Ha. Yang terdapat pada 5 RW yaitu RW I, II, III, VII, dan VIII.

Permasalahan yang ada pada Kelurahan Bareng adalah masih adanya rumah yang tidak layak huni berukuran beberapa meter saja dengan segala keterbatasannya, sampah disungai, dan berbagai masalah lainnya. Pola hidup masyarakat yang masih membuang sampah disungai dan BAB (Mediacenter Malangkota, 2015). Dalam penanganan permukiman kumuh agar dapat berjalan dengan baik perlu dibarengi dengan kesadaran masyarakat. Jika warga tidak bisa mengubah pola hidup dan pemeliharaan kawasan maka pembenahan yang dilakukan untuk menangani permukiman kumuh tidak bisa berkelanjutan. Julimawati (2010) mengatakan bahwa masyarakat sebagai salah satu aktor pembangunan, sangat jelas berperan didalam mekanisme terjadinya perubahan pada lingkungan permukiman, baik dalam aktivitas ataupun kegiatan sehari-hari, mereka secara sadar atau tidak sadar akan terus menerus melakukan langkah-langkah dalam menentukan tempat tinggal, bekerja, belajar, melakukan perjalanan dan kegiatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tulisan ini mencoba melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan kualitas permukiman kumuh, karena mengukur tingkat keterlibatan masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh merupakan salah satu penanganan permukiman kumuh yang dilakukan dengan pendekatan partisipasi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan terjadinya perkembangan permukiman yang tidak terkontrol sehingga berdampak pada munculnya permukiman kumuh. Kelurahan Bareng merupakan salah satu kelurahan di Kota Malang yang termasuk kedalam daerah kawasan kumuh dengan luas 81,56 Ha. Salah satu faktor terjadinya permukiman kumuh adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya.

Permasalahan pada Kelurahan Bareng adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal penanganan kualitas permukiman kumuh. Pada hal manfaat yang didapatkan dari pembangunan berlandaskan partisipasi masyarakat adalah bahwa masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya dan mampu mengidentifikasi sektor-sektor yang perlu dilakukan perbaikan sehingga kehidupannya dapat terarah. Untuk

itu pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: *“Bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Bareng berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan kualitas permukiman kumuh?”*

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji partisipasi masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Bareng Kota Malang.

1.3.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan penelitian seperti yang disebutkan diatas, maka sasaran dari penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Bareng dalam penanganan permukiman kumuh.
- b. Merumuskan tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Bareng dalam penanganan permukiman kumuh.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini yaitu meliputi ruang lingkup lokasi serta lingkup materi pembahasan yang akan di bahas di Bab berikutnya.

1.4.1 Ruang Lingkup Lokasi

Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan persebaran permukiman kumuh di Kelurahan Bareng. Kelurahan Bareng memiliki kondisi kekumuhan yang termasuk kedalam kategori kumuh berat. Kelurahan dengan kumuh berat memiliki status lahan sebagian besar tidak jelas (illegal) dengan tingkat kepadatan penduduk sedang (Wijaya, 2016: 6). Kelurahan Bareng memiliki luasan kawasan kumuh terluas dibandingkan dengan kelurahan lain yaitu seluas 81,56 Ha. Persebaran permukiman kumuh yang berada di Kelurahan Bareng terdapat pada 5 RW yaitu: RW 1, RW 2, RW 3, RW 7, dan RW 8. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta 1.1 dan 1.2

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang dibahas dalam laporan ini adalah tujuan/kegunaan dilakukan penelitian ini. Serta kajian pustaka yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Adapun kajian pustaka tersebut meliputi:

- Pembahasan partisipasi masyarakat berupa pengertian,
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembahasan ini diambil berdasarkan Arnstein (1969). Menurut Arnstein memberikan taksonomi secara jelas tentang jenjang partisipasi masyarakat dalam

kehidupan nyata. Masyarakat akan mengikuti alur secara bertingkat dari tangga pertama sampai tangga kedelapan. Tangga pertama yaitu manipulasi atau penyalahgunaan serta tangga kedua terapi (perbaikan) tidak termasuk dalam konteks partisipasi yang sesungguhnya. Tangga ketiga, pemberian informasi dilanjutkan tangga keempat konsultasi dan tangga kelima peredaman kemarahan/penentraman adalah suatu bentuk usaha untuk menampung ide, saran, masukan dari masyarakat untuk sekedar meredam keresahan masyarakat. Tangga keempat yaitu konsultasi yang disampaikan hanyalah upaya untuk mengundang ketertarikan publik. Tangga kelima adalah peredaman kemarahan. Tangga keenam inilah terjadi partisipasi atau kemitraan masyarakat. Pada tahap ini masyarakat telah mendapat tempat dalam suatu program pembangunan. Pada tangga ketujuh sudah terjadi pelimpahan wewenang oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang terakhir masyarakat sudah dapat melakukan kontrol terhadap program pembangunan. Tahap ini lah yang disebut dengan partisipasi atau dalam peristilahan Arnstein sebagai kekuasaan masyarakat.

- Penjelasan tentang permukiman kumuh berupa pengertian permukiman, faktor pendorong terjadinya permukiman, kondisi permukiman kumuh berdasarkan Wijaya (2016) bahwa Kelurahan Bareng merupakan Klasifikasi 1, yaitu kelurahan dengan kondisi kumuh berat, dengan status lahan sebagian besar tidak jelas (illegal), dengan tingkat kepadatan penduduk sedang.
- Persebaran permukiman kumuh yang berada di Kelurahan Bareng terdapat pada 5 RW yaitu: RW 1, RW 2, RW 3, RW 7, dan RW 8.

1.5 Keluaran dan Manfaat Yang Diharapkan

Adapun keluaran yang akan dicapai dan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1 Keluaran Yang Diharapkan

Keluaran (output) merupakan hasil yang ingin dicapai melalui sasaran. Keluaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah berkaitan dengan mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh. Selain itu, dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh Kelurahan Bareng, Kota Malang.

1.5.1.1 Manfaat Praktis

Penelitian harus menghasilkan manfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca. Berikut ini dikemukakan manfaat dari hasil penelitian meliputi manfaat praktis dan manfaat akademis.

1.5.1.2 Manfaat Akademis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam memecahkan permasalahan yang ada pada masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh dilihat dari keikutsertaan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan pembangunan dapat lebih terarah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, selanjutnya dapat ditentukan prioritas mana yang harus didahulukan untuk dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Masyarakat sebagai pelaku kegiatan ditempat mereka tinggal lebih mengetahui persoalan yang ada dan kebutuhan yang diharapkan sesuai dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran dalam bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota serta dapat menambah wawasan tentang keikutsertaan masyarakat dalam sebuah pembangunan, bahkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian serupa berikutnya terutama pada partisipasi masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh.

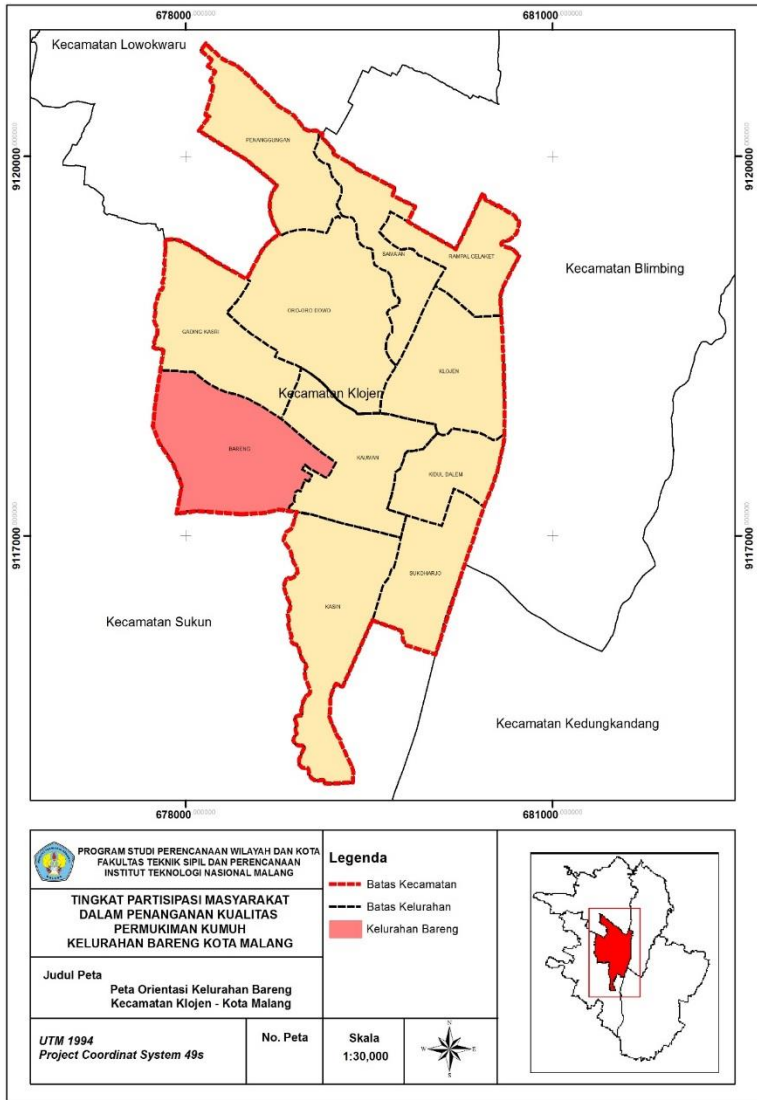
1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang menguraikan:

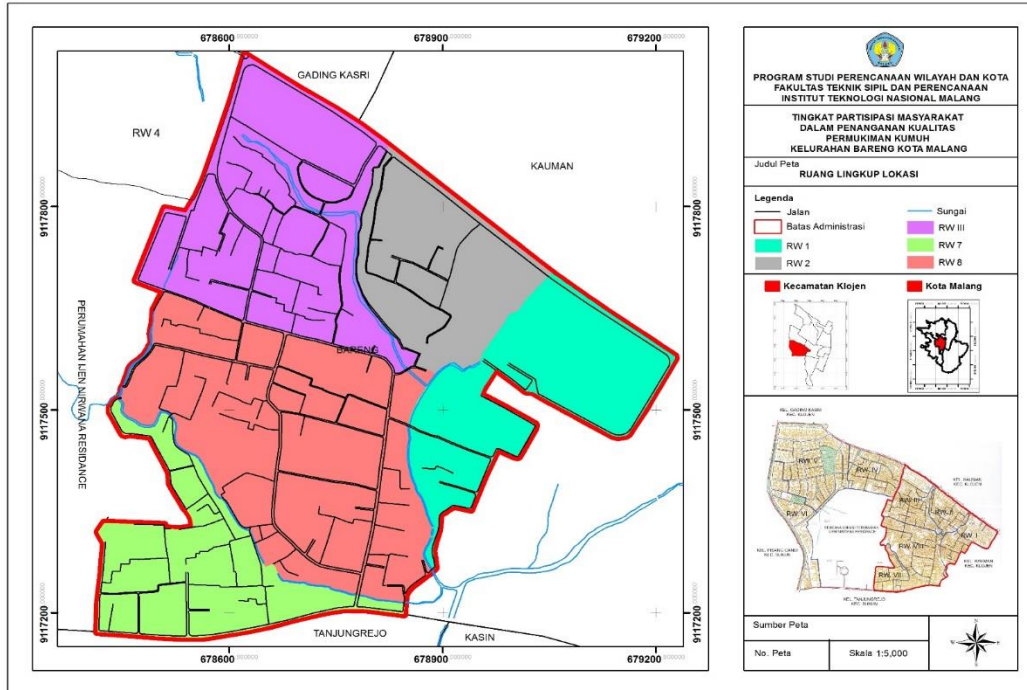
- BAB I PENDAHULUAN, yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup materi, keluaran dan manfaat yang diharapkan kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.
- BAB II KAJIAN PUSTAKA, yang menjelaskan tentang teori-teori yang dipergunakan yang relevan dengan ruang lingkup masalah penelitian.
- BAB III METODELOGI, yang menjelaskan tentang metode yang akan digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh.
- BAB IV GAMBARAN UMUM, yang menjelaskan tentang permukiman kumuh, penanganan permukiman kumuh berdasarkan program-program maupun kegiatan untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh, serta partisipasi masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh tersebut.
- BAB V HASIL ANALISA, yang berupa analisa bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan program-program maupun kegiatan dalam penanganan permukiman kumuh, serta merumuskan tingkat partisipasi masyarakat menurut teori Arnstein berdasarkan program-program maupun kegiatan dalam penanganan permukiman kumuh.

BAB VI PENUTUP, yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil analisa bentuk partisipasi masyarakat serta tingkat tingkat partisipasi masyarakat, dan rekomendasi dari hasil penelitian.

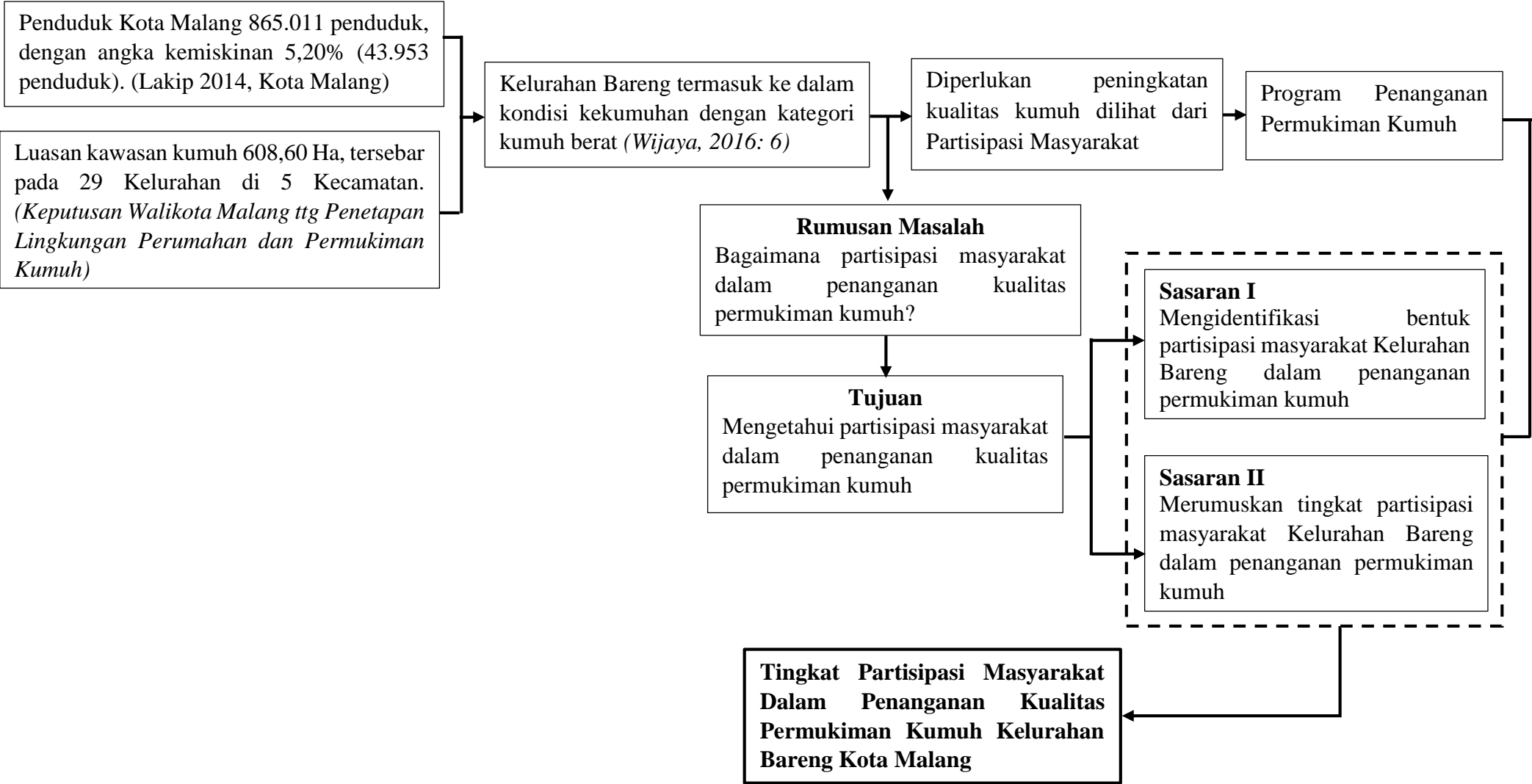
Peta 1.1 Orientasi Kelurahan Bareng



Peta 1.2 Lokasi Penelitian Permukiman Kumuh



Bagan 1.1 KERANGKA PEMIKIRAN



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan teori-teori dari berbagai literatur referensi yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan variabel-variabel amatan yang dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dari penelitian yang akan dilakukan.

2.1 Teori Partisipasi Masyarakat

Pada teori partisipasi masyarakat akan dibahas tentang pengertian partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, pentingnya partisipasi masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.

2.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Keit Davis (1979: 140) dalam Huraerah (2008: 95) Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama bertanggung jawab terhadapnya.

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela tanpa dipaksa sebagaimana yang dijelaskan Sastropetro (1988) bahwa partisipasi adalah keterlibatan spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan. Menurut Mubyarto (1985) partisipasi adalah kesadaran untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan masyarakat, maka partisipasi menyangkut keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi dan menikmati hasilnya atas suatu usaha perubahan masyarakat yang direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat (Sumardjo & Saharudin, 2003) dalam Fahrudin (2011: 37).

Pengertian partisipasi menurut FAO, 1998.b dalam Nalle (2011: 58) sangat beragam, yaitu:

Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.

- a. Partisipasi adalah 'pemekaran' (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- b. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.

- c. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, *monitoring* proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
- d. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
- e. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Partisipasi adalah alat dalam memajukan ideologi atau tujuan-tujuan dalam pembangunan yang normative seperti keadilan sosial, persamaan dan semokrasi.

Konsep partisipasi dalam perkembangannya memiliki pengertian yang beragam walaupun dalam beberapa hal memiliki persamaan. Menurut Gaventa dan Valderama dalam Tjipto Amoko menyatakan bahwa dalam pembangunan yang demokratis terdapat tiga tradisi partisipasi yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga. Partisipasi dalam proses politik yang demokratis melibatkan interaksi individu atau organisasi politik dengan Negara yang diungkapkan melalui tindakan terorganisir melalui pemungutan suara, kampanye, protes, dengan tujuan mempengaruhi wakil-wakil pemerintah. Partisipasi sosial dalam konteks pembangunan diartikan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai pewaris pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan disemua tahapan siklus pembangunan. Dalam hal ini partisipasi sosial ditempatkan diluar lembaga formal pemerintahan. Sedangkan partisipasi warga diartikan sebagai suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka (Satries, 2011: 96).

Menurut Mubyarto (1997) mengatakan, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan dimana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan.

Menurut Huraerah (2008: 96) Partisipasi masyarakat bukan hanya dalam pelaksanaan saja seperti halnya ditafsirkan masyarakat awam pada umumnya, tetapi meliputi kegiatan pengambilan keputusan, penyusunan program, perencanaan program, pelaksanaan program, mengembangkan program, dan menikmati hasil dari pelaksanaan program tersebut.

Menurut Bumberger dan Shams (1989) dalam Fahrudin (2006: 36), terdapat dua pendekatan mengenai partisipasi masyarakat. *Pertama*, partisipasi merupakan proses sadar tentang pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat yang kurang beruntung berdasarkan sumber daya dan kapasitas yang dimilikinya. Dalam hal ini tidak ada campur tangan dan prakarsa pemerintah. *Kedua*, partisipasi harus mempertimbangkan adanya intervensi dari pemerintah dan LSM, di samping peran serta masyarakat.

Menurut Ndraha (1987: 1) menyimpulkan, partisipasi masyarakat meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai satu diantara titik awal perubahan sosial.
- b. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya).
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana).
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan (*participation in benefit*).
- f. Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam sebuah program pembangunan yang dapat meningkatkan kehidupan dan lingkungan mereka baik dalam pengambilan keputusan, penyusunan program, dan pelaksanaan program tersebut.

2.1.2 Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Menurut *Asia Development Bank (ADB)* seperti dikutip Soegijoko (2005) dalam Huraerah (2008: 100-101), tingkatan partisipasi (dari yang terendah sampai tertinggi) sebagai berikut:

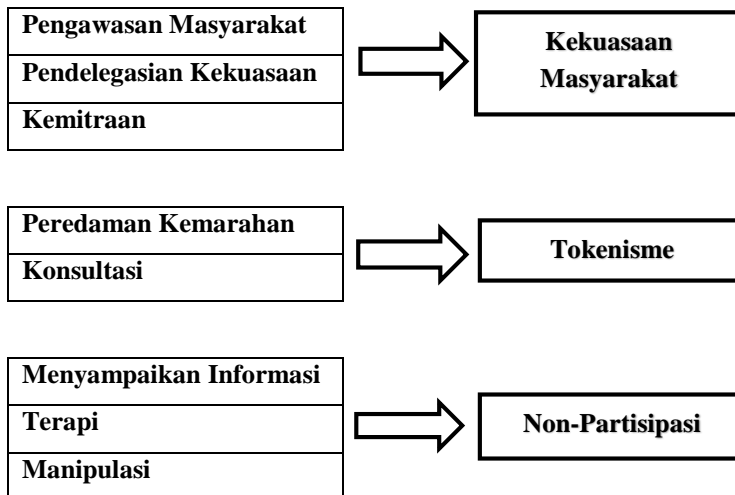
- a) Berbagi informasi bersama (sosialisasi)
Pemerintah hanya menyebarluaskan informasi tentang program yang akan direncanakan atau sekedar memberikan informasi mengenai keputusan yang dibuat dan mengajak warga untuk melaksanakan keputusan tersebut.
- b) Konsultasi / mendapatkan umpan balik
Pemerintah meminta saran dan kritik dari masyarakat sebelum suatu keputusan ditetapkan.
- c) Kolaborasi/pembuatan keputusan bersama
Masyarakat bukan sebagai penggagas kolaborasi, tetapi masyarakat dilibatkan untuk merancang dan mengambil keputusan bersama, sehingga peran masyarakat secara signifikan dapat mempengaruhi hasil/keputusan.
- d) Pemberdayaan/kendali
Masyarakat memiliki kekuasaan dalam mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan keputusan yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan prosedur dan indikator kinerja yang mereka tetapkan bersama.

Hoofsteede seperti dikutip Khairuddin (1992: 125) dalam Huraerah (2008: 101) membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. Partisipasi inisiasi (*inisiation participation*) adalah partisipasi yang mengandung inisiatif dari pemimpin desa, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat.
- b. Partisipasi legitimasi (*legitimation participation*) adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
- c. Partisipasi eksekusi (*execution participation*) adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

Arnstein (1969) dalam Satries (2011: 98-99) menawarkan suatu teori yang disebut dengan teori *The Ladder of Participation* yaitu suatu gradasi atau pentahapan partisipasi masyarakat. Ia membagi partisipasi menjadi delapan tahap, Kedelapan tahap ini merupakan alat analisis untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat. Tahapan tersebut dapat dilihat dalam gambar delapan tingkat partisipasi Arnstein:

Bagan 2. 1 Delapan Tingkat Partisipasi



Dari deskripsi tersebut, Arnstein memberikan taksonomi secara jelas tentang jenjang partisipasi masyarakat dalam kehidupan nyata. Masyarakat akan mengikuti alaur secara bertingkat dari tangga pertama sampai tangga kedelapan dengan logikan sebagai berikut:

- a. Tangga pertama yaitu manipulasi atau penyalahgunaan serta tangga kedua terapi (perbaikan) tidak termasuk dalam konteks partisipasi yang sesungguhnya. Di dalam hal ini masyarakat terlibat dalam suatu program, akan tetapi sesungguhnya keterlibatan mereka tidak dilandasi oleh suatu dorongan mental, psikologis, dan disertai konsekuensi keikutsertaan yang memberikan kontribusi dalam program tersebut. Masyarakat pada posisi ini hanyalah menjadi obyek dalam program.
- b. Tangga ketiga, pemberian informasi dilanjutkan tangga keempat konsultasi dan tangga kelima peredaman kemarahan/penentruman adalah suatu bentuk usaha untuk menampung ide, saran, masukan dari masyarakat untuk sekedar meredam keresahan masyarakat. Oleh karena itu, tangga ini masuk dalam kategori tokenisme (pertanda). Sesungguhnya penyampaian informasi atau pemberitahuan adalah suatu bentuk pendekatan kepada masyarakat agar memperoleh legitimasi publik atas segala program yang direncanakan. Konsultasi yang disampaikan hanyalah upaya untuk mengundang ketertarikan publik untuk mempertajam legitimasi, bukan untuk secara sungguh-sungguh memperoleh pertimbangan dan mengetahui keberadaan publik. Tangga kelima adalah peredaman yang intinya sama saja dengan kedua tahap sebelumnya. Selanjutnya Arnstein menyebutnya sebagai tingkat penghargaan atau formalitas.
- c. Menurut Arnstein baru pada tangga keenam inilah terjadi partisipasi atau kemitraan masyarakat. Pada tahap ini masyarakat telah mendapat tempat dalam suatu program pembangunan. Pada tangga ketujuh sudah terjadi pelimpahan wewenang oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang terakhir masyarakat sudah dapat melakukan kontrol terhadap program pembangunan. Tahap inilah yang disebut dengan partisipasi atau dalam peristilahan Arnstein sebagai kekuasaan masyarakat.

Adapun penjelasan tingkat partisipasi yang lebih rinci menurut teori

Arnstein bahwa:

1. *Manipulation* (manipulasi)
Tingkat partisipasi ini adalah yang paling rendah, yang memposisikan masyarakat hanya dipakai sebagai pihak yang memberikan persetujuan dalam berbagai badan penasehat. Dalam hal ini tidak ada partisipasi masyarakat yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.
2. *Theraphy* (terapi/penyembuhan)
Dengan berkedok melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, para ahli memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam

kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mendapatkan masukan dari masyarakat demi kepentingan pemerintah.

3. *Informing* (informasi)
Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggungjawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Meskipun yang sering terjadi adalah pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kekuasaan kepada masyarakat, tanpa adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Dalam situasi saat itu terutama informasi diberikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana.
4. *Consultation* (konsultasi)
Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju partisipasi penuh dari masyarakat. Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering digunakan adalah survei, pertemuan lingkungan masyarakat, dan dengar pendapat dengan masyarakat.
5. *Placation* (penentraman/perujukan)
Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggotanya wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun usulan dari masyarakat diperhatikan sesuai dengan kebutuhannya, namun suara masyarakat seringkali tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalusedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah.
6. *Partnership* (kerjasama)
Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan dan pembuatan keputusan serta pemecahan berbagai masalah. Telah ada kesamaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.
7. *Delegated Power* (pelimpahan kekuasaan)
Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk memberikan keputusan dominan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik kekuasaan harus mengadakan tawar menawar dengan masyarakat dan tidak dapat

memberikan tekanan-tekanan dari atas. Jadi masyarakat diberi wewenang untuk membuat keputusan rencana dan rencana tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah.

8. *Citizen Control* (kontrol masyarakat)

Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapat bantuan atau pinjaman tanpa melalui pihak ketiga. Jadi masyarakat memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program yang dibuatnya.

Pada tingkat 1 dan 2 disimpulkan sebagai tingkat yang bukan partisipasi atau *non articipation*. Tingkat 3, 4, dan 5 disebut tingkatan penghargaan/tokenisme atau *Degree of Tokenism*. Dan tingkat 6, 7, 8 disebut tingkatan kekuatan masyarakat atau *Degree of Citizen Power*.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa tingkat partisipasi masyarakat terdiri dari beberapa tingkat partisipasi yaitu: partisipasi inisiasi, partisipasi eksekusi, manipulasi, terapi, menyampaikan informasi, konsultasi, peredaman kemarahan, kemitraan, pendelegasian kekuasaan, serta pengawasan dari masyarakat.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Pasaribu dan Simanjuntak (1986) dalam Fahrudin (2011: 39) menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan jenis partisipasi ialah macamnya sumbangan yang diberikan orang atau kelompok yang berpartisipasi. Ada dua jenis partisipasi menurut Khotim (2004), yaitu partisipasi ide dan partisipasi tenaga. Partisipasi ide, merupakan bentuk keterlibatan mengarah pada perumusan, perancangan, dan perencanaan kegiatan. Dalam proses pembangunan, partisipasi ide berada pada fase-fase awal. Partisipasi tenaga, merupakan bentuk keterlibatan masyarakat secara aktivitas sosial.

Pasaribu dan Simanjuntak (1986) dalam Fahrudin (2011: 39-40) mengatakan bahwa sumbangan dalam berpartisipasi dapat dirinci menurut jenis-jenisnya sebagai berikut:

- a. *Partisipasi Buah Pikiran*, yang diberikan partisipan dalam anjan sono, pendapat, pertemuan atau rapat.
- b. *Partisipasi Tenaga*, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
- c. *Partisipasi Harta Benda*, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.

- d. *Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran*, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
- e. *Partisipasi Sosial*, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, melayat (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam pernikahan), nyambungan dan mulang-sambung.

Sedangkan Sulaiman (1985: 23) dalam Huraerah (2008: 103) membagi bentuk-bentuk partisipasi sosial ke dalam lima macam, yaitu:

- a. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersamaan secara fisik dan tatap muka.
- b. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana, dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa diperlukan dari luar, hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
- c. Partisipasi dalam bentuk dukungan
- d. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan,
- e. Partisipasi representif dengan memberikan kepercayaan dan mandate kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Koentjaningrat (1987: 79-80) dalam Huraerah (2008: 103) mengemukakan, partisipasi menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda. Tipe partisipasi tersebut adalah:

- a. Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus
- b. Partisipasi sebagai individu diluar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan

Solekhan (2014: 152-153), bentuk-bentuk partisipasi masyarakat itu pada intinya ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*).
2. Partisipasi dalam menerima pelaksanaan (*participation in implementation*).
3. Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*).
4. Partisipasi dalam evaluasi (*Participation in evaluation*).

Bentuk-bentuk partisipasi menurut referensi yang didapatkan yaitu berupa: partisipasi ide, partisipasi tenaga, partisipasi materi/harta benda, partisipasi sosial, partisipasi dalam pembuatan keputusan, partisipasi dalam menerima pelaksanaan, partisipasi dalam menerima manfaat, serta partisipasi dalam evaluasi.

2.1.4 Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Menurut Diana Conyers dalam Huraerah (2008: 104-105) ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat

setempat, yang tanpa kehadiran program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Contohnya, program KB mengalami kegagalan karena tidak memperhitungkan sikap masyarakat terhadap penggunaan alat-alat kontrasepsi, dan sebagainya. Satu-satunya cara agar berbagai informasi semacam ini diperoleh hanyalah dengan jalan melibatkan masyarakat setempat secara langsung dalam proses perencanaan.

Kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Kepercayaan semacam ini adalah penting, khususnya apabila mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat, karena sebagaimana yang diungkapkan Myrdal *"kepercayaan semacam ini membutuhkan adanya perubahan dalam cara sebagian besar masyarakat untuk berpikir, merasa, dan bersikap."*

Ketiga, yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak Negara, karena timbul anggapan merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Mereka mempunyai hak untuk turut *"urun rembug"* (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Hal ini selaras dengan konsep *"man-centred development"* (suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia), yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekadar sebagai alat pembangunan itu sendiri.

Adisasmita dalam Noegroho (2012: 26) menjelaskan bahwa manfaat yang dihasilkan dalam pembangunan berlandaskan partisipasi masyarakat ini adalah: (1) anggota masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya dan mampu mengidentifikasi sektor-sektor yang perlu dilakukan perbaikan, dengan demikian arah masa depan mereka; (2) anggota masyarakat dapat berperan dalam perencanaan masa depan masyarakatnya tanpa memerlukan bantuan para pakar atau instansi perencanaan pembangunan dari luar daerah; (3) masyarakat dapat menghimpun sumberdaya dan sumberdana dari kalangan anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki masyarakat.

Menurut Sanoff (2000:9), tujuan utama partisipasi adalah: (1) untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan desain keputusan; (2) untuk melengkapi masyarakat dengan suatu suara dalam membuat desain keputusan untuk memperbaiki rencana; dan (3) untuk mempromosikan masyarakat dengan membawanya bersama sebagai bagian dari tujuan umum. Dengan partisipasi, masyarakat secara aktif bergabung dalam proses pembangunan, lingkungan fisik yang lebih baik, semangat publik yang lebih besar, dan lebih puas hati.

Menurut Abe (2005:91), suatu perencanaan yang berbasis prakarsa masyarakat adalah perencanaan yang sepenuhnya mencerminkan kebutuhan konkrit masyarakat dan dalam proses penyusunannya benar-benar melibatkan masyarakat. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan akan membawa dampak penting yaitu: (1) terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, dan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat; (2) memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik; (3) meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat. Schubeller (1996:3) menyatakan, bahwa partisipasi tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan dan menurutnya ada 4 pendekatan strategi partisipasi yaitu:

1. *Community –Based Strategies*
Merupakan bentuk paling dasar dari pembangunan partisipatif.
2. *Area-Based Strategies*
Merupakan bentuk umum dari program-program pemerintah.
3. *Functionally-Based Strategies*
Merupakan struktur fungsional dari sistem infrastruktur sebagai kerangka referensi.
4. *Process-Based Strategies*
Dimana memerlukan seluruh proses manajemen infrastruktur sebagai kerangka referensi.

Referensi diatas menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sangatlah penting. Dengan adanya partisipasi masyarakat akan mempermudah proyek pembangunan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, serta dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dapat menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap informasi pembangunan yang telah disepakati bersama.

2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam suatu program, Timbulnya partisipasi merupakan ekspresi rilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan, dimana perwujudan dari perilaku tersebut didorong oleh adanya tiga faktor utama yang mendukung, yaitu (1) kemauan; (2) kemampuan; dan (3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, Dorodjatin (dalam Slamet, 2003:18). Selain itu ada juga faktor yang menghambat partisipasi masyarakat menurut Watson (dalam Soetomo, 2008:214) mengatakan bahwa ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan.

Menurut Deviyanti (2013: 384) Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal, dijelaskan sebagai berikut :

a. Faktor internal

Menurut Slamet (2003:137-143) dalam Deviyanti (2013: 384), untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi. Sedangkan,

b. Faktor-faktor Eksternal

Menurut Sunarti (dalam Deviyanti 2013: 384), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu Dalam hal ini *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

2.2 Teori Permukiman Kumuh

Pada teori permukiman kumuh akan dibahas tentang pengertian pengertian permukiman kumuh, faktor-faktor pendorong terjadinya permukiman kumuh, kondisi kekumuhan permukiman kumuh kelurahan Bareng, kualitas lingkungan permukiman kumuh, serta penanganan dari permukiman kumuh.

2.2.1 Pengertian Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni. Tidak layak huni karena memiliki kepadatan bangunan yang tinggi, dengan kualitas yang tidak memenuhi syarat, dan dibangun secara tidak beraturan. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana lingkungannya juga tidak memenuhi syarat (Sadana, 2014: 27).

Permukiman kumuh keadaan lingkungan hunian dengan kualitas yang sangat tidak layak huni, dengan ciri-ciri antara lain kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayannya prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Fitria, 2014: 240).

Menurut Yudohusodo (1991) dalam Basri (2010: 5) permukiman kumuh adalah suatu kawasan dengan bentuk hunian yang tidak berstruktur, tidak berpola (misalnya letak rumah dan jalannya tidak beraturan, tidak tersedianya fasilitas umum, prasarana dan sarana air bersih, MCK) bentuk fisiknya yang tidak layak misalnya secara reguler tiap tahun banjir.

Menurut Suparlan (2002) dalam Basri (2010: 5) permukiman kumuh dapat digolongkan sebagai permukiman kumuh karena:

- Kondisi dari permukiman tersebut ditandai oleh bangunan rumah-rumah hunian yang dibangun secara semrawut dan memadati hamper setiap sudut permukiman, dimana setiap rumah dibangun diatas tanah tanpa halaman.
- Jalan-jalan yang ada diantara rumah-rumah seperti labirin, sempit dan berkelok-kelok, serta becek karena tergenang air limbah yang ada disaluran yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- Sampah berserakan dimana-mana dengan udara yang pengap dan berbau busuk.
- Fasilitas umum kurang atau tidak memadai.

Menurut Wijaya (2016: 4) berdasarkan pada karakter fisik dan aspek legalitasnya, klasifikasi permukiman kumuh ada dua jenis yaitu:

- a. Kategori *slum*, yaitu kawasan kumuh tetapi diakui sah sebagai permukiman.
- b. Kategori *squatter settlement*, yaitu permukiman kumuh liar, yang menempati lahan yang tidak ditetapkan untuk kawasan hunian, misalnya: disepanjang rel kereta api, di pinggir kali, di kolong jembatan, di pasar, di kuburan, di tempat pembuangan sampah, dan lainnya. Dari segi legalitasnya, kategori permukiman liar (*squattet*) ini umumnya menempati lahan yang bukan dalam hak penguasaannya misalnya pada lahan kosong yang ditinggal pemiliknya atau pada lahan kosong milik negara.

Permukiman kumuh biasanya dicirikan oleh jaringan sarana seperti jaringan jalan, drainase, saluran limbah dan lain-lain kurang terlayani, kondisi rumah yang tidak layak huni serta lokasi yang berada disepanjang rel kereta api, di pinggir kali dan lainnya yang merupakan tanah ilegal.

2.2.2 Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Permukiman Kumuh

Faktor-faktor utama penyebab tumbuhnya permukiman kumuh, adalah (Sadyohutomoo., dalam Gusmaini, 2010):

1. Pertumbuhan kota yang tinggi, yang tidak diimbangi oleh tingkat pendapatan yang cukup.
2. Keterlambatan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun prasarana kota, terutama jalan, pada daerah perkembangan permukiman.

Menurut Basri (2010: 6) beberapa faktor pendorong timbulnya permukiman kumuh di perkotaan sebagai berikut:

1. Arus Urbanisasi Penduduk
2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
3. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat
4. Karakteristik Fisik Alami

Sadana (2014: 29) berpendapat bahwa terdapat delapan faktor yang dipandang sebagai penyebab terjadinya kekumuhan, yaitu:

1. Tingkat penghasilan
2. Status kepemilikan lahan
3. Lama tinggal
4. Jumlah penghuni
5. Luas lahan
6. Ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan
7. Kepadatan penduduk
8. Jenis bangunan dan bahan bangunan

Dari delapan faktor tersebut, ada yang sangat kuat pengaruhnya, cukup kuat, rendah pengaruhnya, dan ada juga yang tidak berpengaruh terhadap terjadinya kekumuhan. Peringkat perbedaan kekuatan pengaruh faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Permukiman Kumuh

Faktor-faktor Penyebab	Pengaruh	Peringkat
1. Tingkat Penghasilan	Paling Kuat	I
2. Status Kepemilikan Lahan	Cukup Kuat	II
3. Lama Tinggal		
4. Jumlah Penghuni	Rendah	III
5. Luas Lahan		
6. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Lingkungan		
7. Kepadatan Penduduk	Tidak Berpengaruh	IV
8. Jenis bangunan dan bahan bangunan		

Sumber: Diolah dari hasil penelitian Surtiani (2006: 104-105)

Kondisi-kondisi yang bersifat fisik dapat menjadi penyebab langsung terjadinya kekumuhan di lingkungan permukiman. Umumnya atribut fisik penyebab langsung kekumuhan di lingkungan permukiman menyangkut aspek perumahan dan sanitasi. Faktor-faktor langsung penyebab terjadinya kekumuhan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Faktor-faktor Langsung Penyebab Kekumuhan

Faktor Langsung Penyebab Kekumuhan	Aspek
Kondisi rumah	Perumahan
Status kepemilikan lahan	
Kepadatan bangunan	

Faktor Langsung Penyebab Kekumuhan	Aspek
Koefisien dasar bangunan (KDB)	Sanitasi Lingkungan
Kurangnya penyediaan air bersih	
Kebiasaan membuang hajat secara tidak sehat	
Pengelolaan sampah	
Pembuangan air limbah rumah tangga	
Drainase	

Sumber: Diolah dari Hariyanto (2013)

Kondisi-kondisi non fisik yang berlangsung di masyarakat dapat juga mendorong terjadinya kekumuhan dilingkungan permukiman. Beberapa kondisi dalam masyarakat yang bias mempengaruhi terjadinya kekumuhan diantaranya adalah kondisi ekonomi, sosial, dan kebiasaan masyarakat. Perhatikan tabel 2.3

Tabel 2. 3 Faktor-faktor Tidak Langsung Penyebab Kekumuhan

Faktor Tidak Langsung Penyebab Kekumuhan	Aspek
Pendapat masyarakat	Ekonomi
Pekerjaan masyarakat	
Terbangunnay rumah yang tidak permanen	
Jumlah anggota keluarga	Sosial
Tingkat pendidikan	
Tingkat kesehatan	
Tingkat pendidikan	Kebiasaan Masyarakat / Budaya
Faktor kebiasaan masyarakat yang tidak sehat	

Sumber: Diolah dari Hardiyanto (2013).

2.2.3 Kondisi Kekumuhan Permukiman Kumuh Kelurahan Bareng

Kajian tentang permukiman kumuh pada umumnya mencakup tiga segi, pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya komunitas bermukim di permukiman tersebut (Santosa, 2007). Kondisi fisik antara lain tampak dari kondisi bangunan yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan kondisi perkerasan yang kurang baik, sanitasi umum dan saluran drainase tidak berfungsi dengan baik, serta pengelolaan sampah yang kurang baik. Sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal dikawasan permukiman kumuh antara lain mencakup pendapatan yang rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskina yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit, dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan kota keseluruhannya. Oleh karena itu kawasan permukiman kumuh dianggap sebagai permasalahan kota yang harus diatasi.

Kota Malang merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan kota yang sangat cepat baik dalam

pertumbuhan fisik maupun ekonomi. Hal tersebut menjadi daya Tarik bagi para pendatang sebagai kaum urban untuk mengadu nasib dalam mencari nafkah di Kota Malang yang menyebabkan semakin padatnya jumlah penduduk. Sayangnya kedatangan para pengadu nasib tidak selalu diimbangi dengan pengetahuan dan pendidikan yang memadai, sehingga timbul kelompok masyarakat kurang mampu berpenghasilan rendah. Keadaan tersebut diperburuk dengan terbatasnya lahan sebagai wadah kegiatan hidup dan tempat tinggal, yang mengakibatkan tingginya harga tanah dan rumah di Kota Malang. Hal ini menimbulkan daerah-daerah dapat diidentifikasi sebagai suatu daerah yang padat penduduk, dengan tingkat ekonomi yang rendah sehingga tidak memenuhi persyaratan standar hidup layak huni dan sehat, misalnya tersedianya layanan air bersih dan sanitasi, yang merupakan ciri kekumuhan.

Identifikasi kondisi kekumuhan pada kawasan permukiman kumuh di Kota Malang terletak pada setiap kelurahan. Yang menjadi objek penelitian di lakukan dengan memberikan penilaian (*scoring*) pada variabel, indikator dan item yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu pada infrastruktur yang meliputi: (1) kondisi Jalan Lingkungan; (2) kondisi Penyediaan Air Minum; (3) kondisi Drainase Lingkungan (4) Kondisi Pengelolaan Air Limbah; (4) kondisi Pengelolaan Air Limbah; (5) Kondisi Pengelolaan Sampah; dan (6) Kondisi Proteksi Kebakaran.

Sedangkan variabel Status Lahan dan variabel Kepadatan Penduduk dinilai dari hasil pengumpulan data lapangan serta data sekunder.

Wijaya (2016) mengemukakan bahwa penilaian masing-masing item infrastruktur menggunakan rentang nilai/skor dengan perbedaan yang besar, yaitu nilai 5, 3 dan 1. Makna dari masing-masing nilai tersebut adalah:

- a. Nilai 5 mewakili kondisi yang sangat buruk pada item yang dinilai, dengan prosentase parameter kondisi/tingkat pelayanan pada rentang 76% - 100%.
- b. Nilai 3 mewakili kondisi yang cukup buruk pada item yang dinilai, dengan prosentase parameter kondisi/tingkat pelayanan pada rentang 51% - 75%.
- c. Nilai 1 mewakili kondisi yang buruk pada item yang dinilai, dengan prosentase parameter kondisi/tingkat pelayanan pada rentang 25% - 50%.

Menurut Wijaya (2016) Kelurahan Bareng merupakan Klasifikasi 1, yaitu kelurahan dengan kondisi kumuh berat, dengan status lahan sebagian besar tidak jelas (illegal), dengan tingkat kepadatan penduduk sedang.

2.2.4 Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh

Kualitas lingkungan dapat diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal dan selaras bagi kelangsungan

hidup di suatu wilayah. Kualitas lingkungan permukiman tersusun atas komponen sosial, ekonomi, dan fisik (Julimawati, 2015: 155).

Kualitas lingkungan merupakan sebuah cara untuk menjelaskan dan menilai seperangkat atribut dan kondisi yang meliputi pengaturan suatu areabeserta lingkungannya, dimana sekelompok hunian berada (Al Betawi, 2013) dalam (Aslim, 2016: 15).

Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PermenPUPR RI No.2, 2016).

Tinggal dilingkungan yang sehat dan layak huni tentu menjadi dambaan setiap orang. Agar layak huni, pemilihan lokasi perumahan perlu mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut (Hasbi dan Ibrahim, dalam Kasjono, 2011):

- ✚ Tidak terganggu oleh polusi, baik polusi air, udara, maupun suara.
- ✚ Memberi kemungkinan untuk berkembang.
- ✚ Membuat aksesibilitas yang baik.
- ✚ Mudah dan aman untuk mencapai tempat kerja.
- ✚ Tidak dibawah permukaan air.

2.2.5 Penanganan Permukiman Kumuh

Dalam Seminar Nasional. Buku Rusunawa-Rusunawa komitmen bersama penanganan permukiman kumuh bahwa peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan perumahan dengan pola-pola penanganan, yaitu:

- a. Pemugaran

Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan yang layak huni.
- b. Peremajaan
 - 1) Peremajaan sebagaimana dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
 - 2) Peremajaan harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak.
 - 3) Kualitas rumah, perumahan, dan permukiman yang diremajakan harus diwujudkan secara lebih baik dari kondisi sebelumnya.
 - 4) Peremajaan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

Basri (2010: 6) mengatakan bahwa merupakan model yang menjadi acuan dalam upaya memperbaiki permukiman yang mengalami degradasi lingkungan. Beberapa model dalam menangani masalah permukiman kumuh diperkotaan antara lain :

- Model Land Sharing Model land sharing adalah penataan ulang di atas tanah/lahan dengan tingkat kepemilikan masyarakat cukup tinggi. Dalam penataan tersebut, masyarakat akan mendapatkan kembali lahannya dengan luasan yang sama sebagaimana yang selama ini dimiliki/dihuni secara sah, dengan memperhitungkan kebutuhan untuk prasarana umum (jalan, saluran). Beberapa syarat untuk penanganan yang akan dilakukan antara lain:
 - Tingkat pemilikan/penghunian secara sah (mempunyai bukti pemilikan/penguasaan atas lahan yang ditempatinya) cukup tinggi dengan luasan yang terbatas,
 - Tingkat kekumuhan tinggi, dengan ketersediaan lahan yang memadai untuk menempatkan prasarana dan sarana dasar. o Tata letak bangunan tidak berpola.
- Model Konsolidasi Lahan/ Tanah (Land Consolidation)

Konsolidasi lahan merupakan suatu kegiatan terpadu menata (kembali) suatu wilayah yang tidak teratur menjadi teratur, lengkap dengan prasarana dan kemudahan yang diperlukan, agar tercapai penggunaan tanah / lahan secara optimal yang pada prinsipnya dilaksanakan atas swadaya masyarakat sendiri. Konsolidasi lahan juga merupakan suatu sistem pengembangan lahan inkonvensional yang saat ini telah diterapkan di Indonesia, antara lain: Denpasar, Bandung, Palu, Kendari dan beberapa kota lain. Pada prinsipnya secara konseptual konsolidasi lahan kota mengandung tujuan:

 1. Menggabungkan secara sistematis lahan yang berpecah-pecah dan tidak teratur disesuaikan dengan tata ruang.
 2. Mendistribusikan lahan yang telah ada dikonsolidasikan kepada pemilik lahan secara proporsional.
 3. Mengatur bentuk dan letak persil pemilikan.
 4. Meningkatkan nilai ekonomis melalui pengadaan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai di atas lahan yang disumbangkan oleh pemilik. Prinsip dasar konsolidasi lahan adalah:
 1. Kegiatan konsolidasi lahan membiayai dirinya sendiri.
 2. Adanya land polling yang juga merupakan ciri khas konsolidasi lahan.
 3. Hak atas tanah sebelum dan sesudah konsolidasi tidak berubah menjadi lebih tinggi atau lebih rendah.
 4. Melibatkan peran serta secara aktif para pemilik tanah.
 5. Tanah yang diberikan kembali pada pemilik mempunyai nilai yang lebih tinggi dari pada sebelum konsolidasi tanah.
- Model Resettlement

Menurut Johara T.J, (1999). Resettlement atau pemukiman kembali pada umumnya dilakukan melalui program transmigrasi yaitu

perpindahan penduduk (migrasi) dari suatu daerah yang rapat penduduknya umumnya di P. Jawa menuju daerah yang masih jarang penduduknya biasanya terdapat diluar P. Jawa dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan diharapkan dapat meningkatkan integrasi nasional dalam ekonomi dan sosial. Pada Departemen Transmigrasi, resettlement masih merupakan pradesa yaitu tingkat yang lebih rendah dari desa swadaya yaitu permukiman penduduk yang kecil-kecil dan tersebar, yang penduduknya belum menetap pada tempat yang disebut desa. Resettlement atau pemindahan penduduk pada suatu kawasan yang khusus disediakan. Pemindahan penduduk biasanya memakan waktu dan biaya sosial yang cukup besar, termasuk kemungkinan tumbuhnya kerusuhan atau keresahan masyarakat. Pemindahan ini apabila permukiman berada pada kawasan fungsional yang akan/perlu direvitalisasi sehingga memberikan nilai ekonomi bagi pemerintah kabupaten/kota.

- Pembangunan Rumah Susun
Pembangunan rumah susun merupakan suatu model penanganan permukiman kumuh perkotaan dengan mengubah kondisi lingkungan permukiman yang sangat padat penduduknya dan dinilai tidak memenuhi syarat lagi sebagai tempat hunian yang layak. Cara yang dilakukan dalam pembangunan rumah susun adalah dengan memperkecil lahan untuk perumahan tetapi dengan meningkatkan luas lantai. Lahan sisa (residual land) dimanfaatkan untuk penempatan fungsi perkotaan produktif misalnya komersial, perkantoran atau pusat hiburan dan penempatan prasarana lingkungan (jalan dan utilitas umum) dan sarana lingkungan (fasilitas sosial dan fasilitas umum). Rumah susun merupakan sebagai suatu bangunan rumah bertingkat yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal dan vertikal terdiri atas satuan atau unit dengan batasan yang jelas baik ukuran maupun luasnya. Pembangunan kembali pada kawasan permukiman kumuh secara vertikal maksimal 4 (empat) lantai dengan maksud sebagai berikut:
 1. Supaya dapat menampung seluruh penghuni.
 2. Harga tanah di pusat kota relatif tinggi.
 3. Sebagian tanah digunakan untuk kebutuhan sosial.
 4. Sebagian tanah dijual kepada pihak swasta atau pemerintah guna memperkecil biaya pembangunan untuk meringankan harga sewa atau cicilan.
 5. Sebagian tanah diserahkan pada pemerintah untuk membangun infrastruktur dan fasilitas sosial lainnya sebagai pendukung kawasan.

- Program Perbaikan Kampung / Kampung Improvement Program (KIP) Program Perbaikan Kampung (KIP) merupakan suatu pola pembangunan kampung yang didasarkan pada partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan pemenuhan kebutuhannya. Program ini mempunyai prinsip universal yang berlaku dimanamana yakni memberdayakan dan menjadikan warga sebagai penentu dan pemamfaat sumberdaya kota guna memperbaiki taraf hidup dan kemampuan untuk maju. Prinsip dari program perbaikan kampung adalah perbaikan lingkungan kampung-kampung kumuh di pusat kota yang berada di atas tanah milik masyarakat yang mempunyai kepadatan tinggi.
- c. Permukiman kembali
- 1) Permukiman kembali sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni masyarakat.
 - 2) Permukiman kembali dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.
 - 3) Permukiman kembali dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk permukiman kembali ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Menurut Lestari (2005: 33) bahwa mengatasi masalah permukiman tidak terbatas pada perbaikan lingkungan fisik namun juga perlu ada penanaman kesadaran akan pentingnya lingkungan sehat dan tertata. Salah satu model penanganan kawasan permukiman kumuh adalah dengan konsep peremajaan dan pembangunan bertumpu pada masyarakat yang terbagi dalam:

1. Konsep Peremajaan

Peremajaan permukiman kota adalah segala upaya dan kegiatan pembangunan yang terencana untuk mengubah/memperbaharui suatu kawasan terbangun di kota yang yang fungsinya sudah merosot atau tidak sesuai dengan perkembangan kota. Sehingga kawasan tersebut dapat meningkat kembali fungsinya dan menjadi sesuai dengan pengembangan kota. Peningkatan fungsi dalam peremajaan kota dimaksudkan untuk memperbaiki tatanan sosial ekonomi di kawasan bersangkutan agar lebih mampu menunjang kehidupan kota secara lebih luas. Peremajaan harus dapat memecahkan kekumuhan secara mendasar, karenanya tidak hanya memberi alternatif pengganti lain yang pada kenyataannya dapat menimbulkan kekumuhan di tempat lain dan menjadikan beban baru bagi masyarakat, tetapi peremajaan harus

tanpa menggusur dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Sehingga peremajaan yang antara lain dengan perbaikan fisik dipakai sebagai suatu alat untuk peningkatan taraf hidup, yang sekaligus memperbaiki pula kondisi fisik kota sejalan dengan program nasional penanggulangan kemiskinan.

2. Pembangunan Bertumpu Pada Masyarakat

Pembangunan yang bertumpu pada kelompok masyarakat secara umum dapat dikatakan sebagai metode, proses, pendekatan dan bahkan pranata pembangunan yang meletakkan keputusan-keputusannya berdasarkan keputusan masyarakat. Tujuan dari pendekatan ini yaitu agar hasil pembangunan dapat diterima oleh masyarakat penghuni kawasan tersebut sesuai dengan kegiatan yang telah mereka laksanakan. Dalam pendekatan ini, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam proses perencanaan dan perancangan program pembangunan. Dua hal dapat ditarik dari pendekatan untuk permukiman. Pertama, metode partisipasi merupakan metode penting karena dengan metode inilah keputusan-keputusan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat diambil. Kedua, karena pendekatan partisipatif dalam konteks ini adalah bersifat langsung, pengertian masyarakat selalu diartikan kelompok yang langsung memiliki kepentingan dengan proses pembangunan permukiman yang terkait. Karena itu, seringkali pendekatan Pembangunan Bertumpu Pada Masyarakat dilakukan untuk pembangunan yang bersifat lokal dan berorientasi pada kepentingan-kepentingan lokal. Keberhasilan suatu pembangunan yang melibatkan swadaya masyarakat yaitu adanya keberlanjutan finansial untuk pembangunan.

2.3 Sintesa Kajian Pustaka

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari hasil sintesa beberapa teori dari tinjauan pustaka terkait penelitian yang akan dilakukan di Kelurahan Bareng, Kota Malang. Berdasarkan kajian pustaka partisipasi masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh merupakan keikutsertaan masyarakat dalam sebuah pembangunan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas permukimannya. Dalam meningkatkan kualitas permukimannya perlu adanya tingkatan partisipasi masyarakat. Yang selanjutnya akan ditentukan variabel tingkatan partisipasi masyarakat berdasarkan karakteristik dari partisipasi masyarakat.

Dalam menentukan partisipasi masyarakat peneliti menggunakan variabel amatan berupa bentuk partisipasi yaitu: partisipasi ide, partisipasi tenaga, dan partisipasi harta benda. Dari bentuk partisipasi ini akan dikelompokkan berdasarkan tingkatan partisipasi masyarakat dimana tingkatan partisipasi masyarakat Menurut Arnstein terdapat 8 tingkatan yaitu:

Manipulasi, Terapi, Penyampaian Informasi, Konsultasi, Peredaman
Kemarahan, Kemitraan, Pendelegasian kekuasaan , dan Pengawasan
Masyarakat

SASARAN I : Mengidentifikasi Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh

Teori	Variabel	Indikator	Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh
<p>✚ Pasaribu dan Simanjuntak (1986) dalam Faharudin (2011: 39-40) mengatakan bahwa sumbangan dalam berpartisipasi dapat dirinci menurut jenis-jenisnya: partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, serta partisipasi keterampilan dan kemahiran.</p> <p>✚ Ada dua jenis partisipasi menurut Khotim (2004), yaitu partisipasi ide dan partisipasi tenaga</p> <p>✚ Solekhan (2014: 152-153), bentuk-bentuk partisipasi masyarakat itu pada intinya ada 4 (empat) macam, yaitu: partisipasi dalam pembuatan keputusan, partisipasi dalam menerima pelaksanaan, partisipasi dalam menerima manfaat dan partisipasi dalam evaluasi.</p>	Partisipasi Ide	<p>✚ Informasi Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>✚ Masyarakat dapat memberikan pendapat/usulan</p> <p>✚ Ikut berperan dalam pengambilan keputusan</p> <p>✚ Ikut berperan dalam evaluasi program</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Program Bedah Rumah – Program 3R (Bank Sampah) – Program Sektor Sanitasi Lingkungan
	Partisipasi tenaga	<p>✚ Menghadiri kegiatan penanganan permukiman kumuh</p> <p>✚ Masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan</p> <p>✚ Mengawasi hasil dari pembangunan</p> <p>✚ Mengetahui kerusakan dari pembangunan</p>	
	Partisipasi Harta Benda	Pemberian bantuan berupa harta maupun benda yang dibutuhkan dalam penanganan permukiman kumuh	

Teori	Variabel	Indikator	Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh
	Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran	Memiliki keahlian dalam kegiatan penanganan permukiman kumuh seperti ahli dalam membangun konstruksi bangunan, mengolah sampah dan lain-lain.	

Sumber : Hasil Kajian Pustaka, 2017

SASARAN II : Merumuskan Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Bareng dalam Penanganan Permukiman Kumuh

Teori	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Karakteristik Partisipasi
Menurut Arnstein (1969), partisipasi dibagi menjadi delapan tahapan yaitu: manipulasi, terapi, menyampaikan informasi, konsultasi, peredaman kemarahan, kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan pengawasan masyarakat.	Manipulasi	Masyarakat tidak mengetahui informasi dari pelaksanaan kegiatan
	Terapi	Masyarakat mengetahui adanya informasi pelaksanaan kegiatan
	Menyampaikan Informasi	Masyarakat menghadiri sosialisasi, tanpa memberikan usulan/pendapat hanya mendengarkan dari satu pihak
	Konsultasi	Masyarakat memberikan pendapat/usulan
	Peredaman Kemarahan	Pendapat/usulan dari masyarakat diterima oleh pihak pelaksana kegiatan, tetapi usulan tersebut tetap dinilai kelayakannya oleh satu pihak
	Kemitraan	Masyarakat dan pihak pelaksana kegiatan secara bersama-sama melaksanakan kegiatan dalam pembangunan yang telah direncanakan
	Pendelegasian Kekuasaan	Masyarakat diberikan kewenangan dalam mengawasi hasil dari pembangunan
	Pengawasan Masyarakat	Masyarakat diberikan tanggung jawab sepenuhnya dalam melakukan mengevaluasi hasil dari pembangunan

Sumber : Hasil Kajian Pustaka, 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini dimulai dari metode penelitian sampai dengan teknik analisis. Sehingga, dapat mempermudah pemahaman dan pelaksanaan penelitian. Tahapan ini dilakukan secara berurutan dengan mengemukakan metode penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kuantitatif yang lebih terfokus pada data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan.

3.2 Kebutuhan Data

Dalam menunjang penelitian ini diperlukan data sebagai informasi dari pihak terkait dari objek penelitian dan sebagai dasar proses untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer, yaitu data yang akan digali dari masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh di Kelurahan Bareng.

Data primer yang dapat diperoleh dari observasi dapat diwujudkan dalam bentuk foto, wawancara, dan kuisisioner. Dalam penelitian ini peneliti memilih melalui observasi lapangan dan kuisisioner.

a. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu kuisisioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuisisioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet.

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu melalui kuisisioner.

3.3 Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.

Teknik sampling yang akan digunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi yang diteliti (Sugiono, 2015: 219-220). Sehingga peneliti mengambil sampel ketua RT disetiap RWnya karena mereka sebagai penguasa atau memiliki kekuasaan terhadap lokasi yang menjadi penelitian.

Jadi untuk jumlah sampel yang diambil peneliti untuk menyebarkan kuisioner dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. 1 Jumlah Penyebaran Kuisioner

RW	Jumlah Sampel
I	10
II	8
III	14
VII	7
VIII	21
Total	60

Sumber: Penulis, 2017

Jumlah sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 60 responden.

3.4 Tahapan Analisis

Dalam teknik analisa yang digunakan, peneliti menggunakan skor pada setiap sektor yang ditanyakan pada kuisioner maupun wawancara. Langkah selanjutnya adalah menganalisa dan mengolah data sesuai dengan standar yang dimiliki.

3.4.1 Identifikasi bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Bareng dalam penanganan permukiman kumuh

Dalam metode analisis yang dilakukan dalam tingkat partisipasi masyarakat peneliti menggunakan variabel amatan dan metode sebagai berikut:

a. Variabel Amatan

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011).

Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3. 2 Variabel Amatan Bentuk Partisipasi Masyarakat

Variabel	Indikator	Metode	Output
Partisipasi Ide	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Informasi Pelaksanaan Kegiatan ✚ Masyarakat dapat memberikan pendapat/usulan ✚ Ikut berperan dalam pengambilan keputusan ✚ Ikut berperan dalam evaluasi program 	Deskriptif	Identifikasi Bentuk Partisipasi Masyarakat
Partisipasi tenaga	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Menghadiri kegiatan penanganan permukiman kumuh ✚ Masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan ✚ Mengawasi hasil dari pembangunan ✚ Mengetahui kerusakan dari pembangunan 		
Partisipasi Harta Benda	Pemberian bantuan berupa harta maupun benda yang dibutuhkan dalam penanganan permukiman kumuh		
Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran	Memiliki keahlian dalam kegiatan penanganan permukiman kumuh seperti ahli dalam membangun konstruksi bangunan, mengolah sampah dan lain-lain.		

Sumber : Hasil Kajian Pustaka, 2017

b. Metode Deskriptif Kualitatif

Metode deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek

dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya (Sugiyono, 2011). Sehingga peneliti disini hanya menggambarkan kondisi dilapangan melalui kuisioner.

3.4.2 Merumuskan tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan kualitas permukiman kumuh

Dalam metode analisis yang dilakukan dalam tingkat partisipasi masyarakat peneliti menggunakan variabel amatan dan metode sebagai berikut:

a. Variabel Amatan

Variabel penelitian pada tingkatan partisipasi masyarakat diambil menurut teori Arnstein, dimana tingkatan partisipasi masyarakat terbagi menjadi delapan tingkatan.

Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

Tabel 3.3 Variabel Amatan Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Teori Arnstein

Tingkat Partisipasi Masyarakat	Karakteristik Partisipasi	Metode	Output
Manipulasi	Masyarakat tidak mengetahui informasi dari pelaksanaan kegiatan	Pembobotan dan Skoring	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Permukiman kumuh
Terapi	Masyarakat mengetahui adanya informasi pelaksanaan kegiatan		
Menyampaikan Informasi	Masyarakat menghadiri sosialisasi, tanpa memberikan usulan/pendapat hanya mendengarkan dari satu pihak		
Konsultasi	Masyarakat memberikan pendapat/usulan		
Peredaman Kemarahan	Pendapat/usulan dari masyarakat diterima oleh pihak pelaksana kegiatan, tetapi usulan tersebut tetap dinilai kelayakannya oleh satu pihak		
Kemitraan	Masyarakat dan pihak pelaksana kegiatan secara bersama-sama melaksanakan kegiatan dalam pembangunan yang telah direncanakan		

Tingkat Partisipasi Masyarakat	Karakteristik Partisipasi	Metode	Output
Pendelegasian Kekuasaan	Masyarakat diberikan kewenangan dalam mengawasi hasil dari pembangunan		
Pengawasan Masyarakat	Masyarakat diberikan tanggung jawab sepenuhnya dalam melakukan mengevaluasi hasil dari pembangunan		

Sumber : Hasil Kajian Pustaka, 2017

b. Pembobotan dan Skoring

Pemberian bobot digunakan dalam penelitian ini, didasarkan pada nilai tingkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh. Adapun nilai dari tiap tingkatan partisipasi masyarakat yaitu:

Tabel 3. 4 Skoring Tingkat Partisipasi

No	Tingkatan Partisipasi	Nilai Bobot
1	Manipulasi	1
2	Terapi	2
3	Menyampaikan Informasi	3
4	Konsultasi	4
5	Peredaman Kemarahan	5
6	Kemitraan	6
7	Pendelegasian Kekuasaan	7
8	Pengawasan Masyarakat	8

Sumber: Adviyanty, 2013

c. Klasifikasi Skala Penilaian

Klasifikasi skala partisipasi masyarakat dilihat dari banyaknya pertanyaan untuk setiap individu. Klasifikasi dengan menggunakan *Rumus Sturges* yaitu perhitungan yang menentukan banyakna kelas pada pengelompokan data interval dengan data terbanyak n, persamaan ini diperoleh dari analisis statistik (*Advanced Statistica for Degree*).

Kelas Interval yang digunakan adalah:

$$KI = \frac{(Data\ terbesar - Data\ terkecil)}{jumlah\ kelas\ yang\ dikehendaki}$$

Jika diketahui jumlah sampel ada 60 orang dan jumlah kelas ada 8, dapat diketahui skor minimum 8 dan skor maksimumnya adalah $8 \times 60 = 480$.

Maka kelas intervalnya adalah:

$$KI = \frac{(480 - 60)}{8} = 52$$

Jadi untuk skala penilaian pada tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 5 Klasifikasi Penilaian Tingkat Partisipasi

No	Tingkatan Partisipasi	Klasifikasi Penilaian
1	Manipulasi	60 – 112
2	Terapi	113 – 165
3	Menyampaikan Informasi	166 – 218
4	Konsultasi	219 - 271
5	Peredaman Kemarahan	272 – 324
6	Kemitraan	325 – 377
7	Pendelegasian Kekuasaan	378 – 427
8	Pengawasan Masyarakat	428 - 480

Sumber: Hasil Perhitungan, 2017

d. Frekuensi

Pengelompokan data yang dilakukan dengan cara mendistribusikan data dalam kelas atau selang dan menetapkan banyak nilai yang termasuk dalam kelas yang disebut frekuensi kelas. Suatu pengelompokan atau penyusunan data menjadi tabulasi data yang memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya disebut *distribusi frekuensi* atau *tabel frekuensi* (Boediono, 2008: 39).

Untuk menghasilkan tingkat partisipasi masyarakat dapat diperoleh melalui ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan dan nilai tersebut menunjukkan pusat data (Boediono, 2008: 56). Ukuran pemusatan data dapat diperoleh dengan cara:

$$\bar{X} = X_0 + c \left(\frac{\sum fU}{\sum f} \right)$$

Keterangan : \bar{X} = Rata-rata Hitung

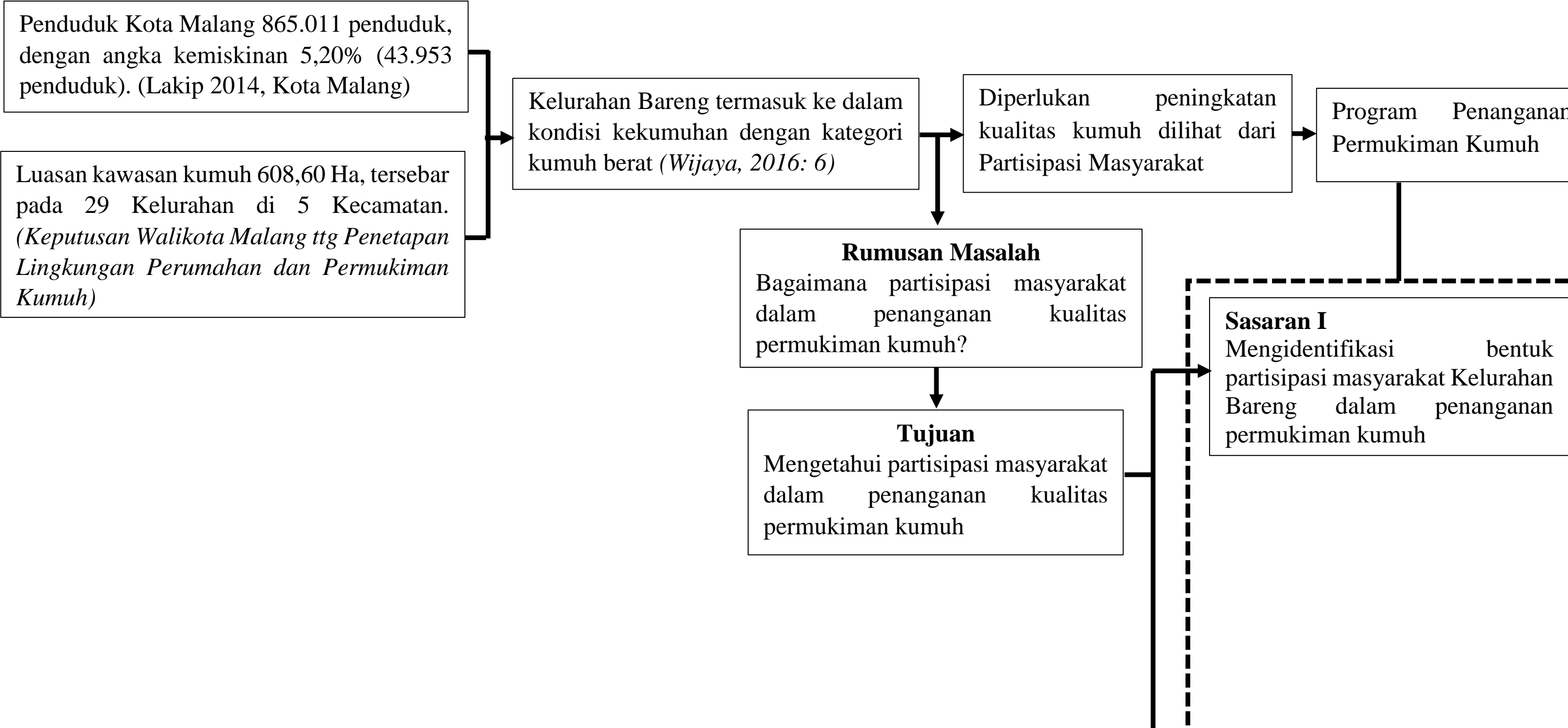
X_0 = Nilai Tengah Kelas

c = Lebar Kelas

$\sum fU$ = Jumlah Semua Nilai Data

$\sum f$ = Banyaknya Nilai Data

Bagan 3.2 KERANGKA KERJA



BAB IV

GAMBARAN UMUM

Pada bab ini berisi membahas tentang gambaran tentang lokasi penelitian sesuai dengan kondisi lapangan saat ini.

4.1 Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu Kota pusat kegiatan Nasional di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomi terletak pada posisi $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ bujur timur, $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ lintang selatan dengan batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kec. Singosari dan Kec. Karangploso
Sebelah Timur	: Kec. Pakis dan Kec. Tumpang Kab Malang
Sebelah Selatan	: Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji Kab. Malang
Sebelah Barat	: Kec. Wagir dan Kec. Dau Kab Malang

Luas wilayah Kota Malang sebesar $110,06 \text{ km}^2$ yang terbagi dalam lima kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing dan Lowokwaru. Penelitian ini berada di Kecamatan Klojen Kelurahan Bareng.

4.2 Gambaran Umum Kelurahan Bareng

Kelurahan Bareng merupakan Kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Klojen yang terletak di tengah-tengah Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari 8 RW (Rukun Warga) dan 74 RT (Rukun Tetangga) dengan luas wilayah 10.650 km^2 . Jumlah penduduk sebanyak 23.065 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 2,165 jiwa/ha. Secara administratif, Kelurahan Bareng di kelilingi oleh Kelurahan lainnya yang berada di Kota Malang. Disebelah utara, Kelurahan Bareng berbatasan langsung dengan Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen. sebelah timur berbatasan langsung dengan Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun. Sementara sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun dan disebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen. Kelurahan Bareng memiliki luas area $1,07 \text{ km}^2$ dengan ketinggian dari permukaan laut 467 m dpl, suhu minimum 18°C – 30°C , curah hujan 1.835 mm/tahun dengan topografi datar dan landai. Penggunaan lahan di Kelurahan Bareng di dominasi oleh permukiman yang terdiri dari permukiman kampung, perumahan dinas dan perumahan developer yang tersebar di 8 RW Kelurahan Bareng.

4.3 Gambaran Umum Permukiman Kumuh Kelurahan Bareng

Kelurahan Bareng yang memiliki 8 RW, tidak seluruh RW memiliki permukiman kumuh. Permukiman kumuh pada Kelurahan Bareng terdapat pada 5 RW yaitu RW 1, RW 2, RW 3, RW 7, dan RW 8.

4.3.1 Kependudukan

Jumlah penduduk pada Kelurahan Bareng dibagi menjadi jumlah penduduk berdasar RW, dimana RW yang diambil adalah RW yang masuk kedalam kategori permukiman kumuh. Untuk jumlah penduduk kelurahan Bareng dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Menurut RW Kelurahan Bareng

RW	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK
I	1.480	296
II	1.325	270
III	2.498	487
VII	1.886	377
VIII	4.566	913
Total	11.735	2.343

Sumber: Data Penduduk Kelurahan Bareng, 2016

Total dari jumlah penduduk Kelurahan Bareng yang termasuk dalam lingkungan permukiman kumuh sebanyak 11.735 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi terdapat pada RW 08 sebanyak 4.566 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada RW 02 sebanyak 1.325 jiwa.

Pendidikan merupakan salah satu yang terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat. Adapun jumlah penduduk berdasarkan pendidikan sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Terakhir

RW	Jumlah Penduduk (Jiwa)						
	Tidak Bersekolah	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2
I	247	174	191	463	24	48	7
II	202	192	166	461	18	190	10
III	344	354	376	844	48	64	14
VII	329	299	301	620	51	123	7
VIII	577	626	704	1.679	171	391	17
Total	1.699	1.645	1.738	4.067	312	816	55

Sumber: Data Penduduk Kelurahan Bareng, 2016

Jumlah pendidikan terakhir pada Kelurahan Bareng yang terdapat pada lokasi permukiman kumuh dengan jumlah tertinggi yaitu tamatan SMA sebanyak 4.067 jiwa, sedangkan yang terendah dengan tamatan S2 sebanyak 55 jiwa.

4.3.2 Fasilitas Kelurahan Bareng

Ketersediaan sarana pada Kelurahan Bareng terdiri dari beberapa sarana yaitu sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, peribadatan dan perkantoran.

Tabel 4. 3 Jumlah Sarana Umum di Kelurahan Bareng

No	Jenis Sarana	Jumlah (Unit)
1	Pendidikan	33
2	Panti asuhan	1
3	Kesehatan	14
4	Pasar	1
6	Peribadatan	32
7	Perkantoran	1

Sumber: Buku Potensi dan Perkembangan Kelurahan Bareng Tahun, 2015

Kondisi sarana umum dalam keadaan baik dan rata-rata sarana telah mencukupi kebutuhan dari warga Kelurahan Bareng.

4.3.3 Kondisi Fisik Bangunan

Kondisi fisik bangunan pada lokasi penelitian berupa kepadatan bangunan dan kualitas bangunan.

a. Kepadatan Bangunan

Kepadatan bangunan pada lokasi studi memiliki kepadatan dengan kategori padat. Antara satu rumah dan rumah lainnya saling berdekatan adapula yang bergandengan dengan rumah lainnya. Serta rumah yang berada di lokasi studi antara luas bangunan luas tanah sama, tidak memiliki halaman.

b. Kualitas Bangunan

Kualitas bangunan yang dimiliki rumah-rumah pada Kelurahan Bareng memiliki kualitas bangunan yang cukup baik. Tetapi masih ada sebagian rumah yang masih tidak layak huni di Kelurahan Bareng yaitu pada RW 07. Rumah-rumah yang tidak layak huni tersebut belum mendapatkan penanganan berupa program bedah rumah.



Gambar 4. 1 Rumah Tidak Layak huni RW 07

Rumah tersebut dalam kondisi tidak layak huni dimana memiliki kondisi atap yang sudah mulai runtuh, dinding yang sudah hampir berlubang, dan kondisi lainnya.

4.3.4 Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan pada lokasi penelitian berupa kondisi jalan, kondisi drainase, dan banjir.

a. Kondisi Jalan

Permukiman yang terdapat di Kelurahan Bareng merupakan permukiman yang memiliki kepadatan bangunan kategori sedang dengan kondisi jalan beton serta jalan dengan ukuran sempit yaitu 1 m (meter).



Gambar 4. 2 Kondisi Jalan Lingkungan di RW 8
Sumber : Hasil Survey, 2017

b. Kondisi Drainase

Kondisi terkait drainase atau saluran air pada Kelurahan Bareng yaitu pada setiap jalan yang lebar 6 atau 5 meter memiliki jenis drainase terbuka, sedangkan pada jalan dengan lebar 1 sampai 3 meter memiliki drainase tertutup. Selain itu jaringan drainase tersebut dalam keadaan dangkal dan rawan penyumbatan sampah, sehingga air yang mengalir pada saluran drainase mengalami genangan dengan waktu yang cukup lama.

c. Banjir Pada Kelurahan Bareng

Pada lokasi survei masih terdapat permukiman yang masih terdampar oleh banjir yaitu pada RW 7 (RT 1 dan RT 2). Menurut keterangan warga yang berlokasi pada daerah tersebut mengatakan bahwa banjir yang terjadi diakibatkan luapan sungai kiriman dari Purwosari, Ijen dan Dieng dengan ketinggian banjir hingga pinggang orang dewasa selama satu jam.



Gambar 4. 3 Daerah yang menjadi lokasi banjir
Sumber : Hasil Survey, 2017

4.4 Gambaran Umum Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Bareng

Sebagai kelurahan yang memiliki lingkungan permukiman kumuh yang paling luas. Adapun penanganan permukiman kumuh yang pernah dilakukan di Kelurahan Baren yaitu:

4.4.1 Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM)

Program sanitasi berbasis masyarakat merupakan merupakan salah satu komponen Program Urban Sanitasi and Rural Infrastructure (USRI) yang diselenggarakan sebagai program pendukung PNPB-Mandiri. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Program SPBM ini didanai oleh PNPB SPBM USRI sebesar Rp. 350.000.000,00 dan Swadaya sebesar Rp. 5.750.000,-. Program SPBM pada Kelurahan Bareng terdapat pada RW 08 – RT 04. Program ini berjalan sejak tahun 2010 – 2015. Dan pelaksanaan pembangunan untuk sanitasinya dilakukan pada tahun 2012 – 2013. Untuk lokasi pembangunan IPAL Komunal dapat dilihat pada peta 4.1

Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lain dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi yang pernah dilakukan di Kelurahan Bareng dalam penanganan permukiman kumuh berupa sosialisasi dalam Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat.



Gambar 4. 4 Sosialisasi Pra Program SPBM

Sumber: Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPP Purworupo

Program SPBM dimulai dengan pendekatan dan pemberitahuan informasi tentang program tersebut. Setelah melakukan pemberitahuan informasi, masyarakat di arahkan untuk menghadiri sosialisasi pra program SPBM. Sosialisasi dilakukan hingga 6 kali pertemuan.

Pada tahap berikutnya masyarakat melakukan tahap pembangunan IPAL Komunal.



Gambar 4. 5 Tahap Pembangunan Program SPBM

Sumber: Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPP Purworupo

Pada tahap pembangunan ipal komunal ini dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bareng. Masyarakat ikut serta dalam pembangunan mulai dari penyaluran pipa hingga pembangunan konstruksi bangunan IPAL Komunal.

Setelah pembangunan IPAL Komunal dilakukan sosialisasi pemeliharaan sanitasi dilakukan oleh TIM IUWASH kepada masyarakat Kelurahan Bareng. Sosialisasi tersebut dilakukan pada ruang operasional dan ipal komunal yang terdapat pada Rt 02 Rw 08.



Gambar 4. 6 Sosialisasi Pemeliharaan Sanitasi Oleh Tim IUWASH

Sumber: Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KPP Purworupo

Adapun anggota-anggota yang berperan dalam Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat ini terdiri dari:

Struktur Organisasi KSM Purworupo

Ketua	: Ach. Saiful
Sekretaris	: Rifki Hadi Suryo, ST
Bendahara	: H. Halik
Seksi-Seksi	
Tenaga Kerja	: Kadang Pancoro
Pengadaan Barang	: Hadi Mustofa
Kontribusi	: Ngatemi
Kampanye Kesehatan	: Lisani dan Eni S
Operasi dan Pemeliharaan	: Jurianto

Struktur Organisasi KSM Pengelola SPBM

Ketua	: Jurianto
Anggota	: Lisani Hadi Mustofa Nurul Azizah

Dari struktur keorganisasian tersebut dapat membantu masyarakat dalam pelaksanaan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat dengan baik.

4.4.2 Program Bank Sampah

Bank Sampah merupakan suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah tersebut akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau tempat pengempul sampah.

Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis.



Gambar 4. 7 Kerajinan Hasil Sosialisasi Pembuatan Kerajinan Dari Sampah
Sumber: Hasil Survey, 2017

Pada tahap sosialisasi ini menurut narasumber pengelola dari bank sampah bahwa pada setelah tahap sosialisasi pembuatan daur ulang sampah

masyarakat meluangkan waktu untuk bekerja mendaur ulang sampah, tetapi setelah beberapa tahun masyarakat tidak mengelola lagi sampah yang dapat didaur ulang, disebabkan oleh pendapatan dari mendaur ulang tidak sepadan dengan kebutuhan atau upah yang diperoleh. Sehingga, masyarakat memilih untuk beralih pekerjaan.

Pada hal tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah. Tujuan bank sampah selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih.

Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.

Bank sampah pada RW 08 hanya menyimpan sampah hasil pilahan pada gudang ruang operasional dan perawatan IPAL komunal yang terletak pada RT 04.



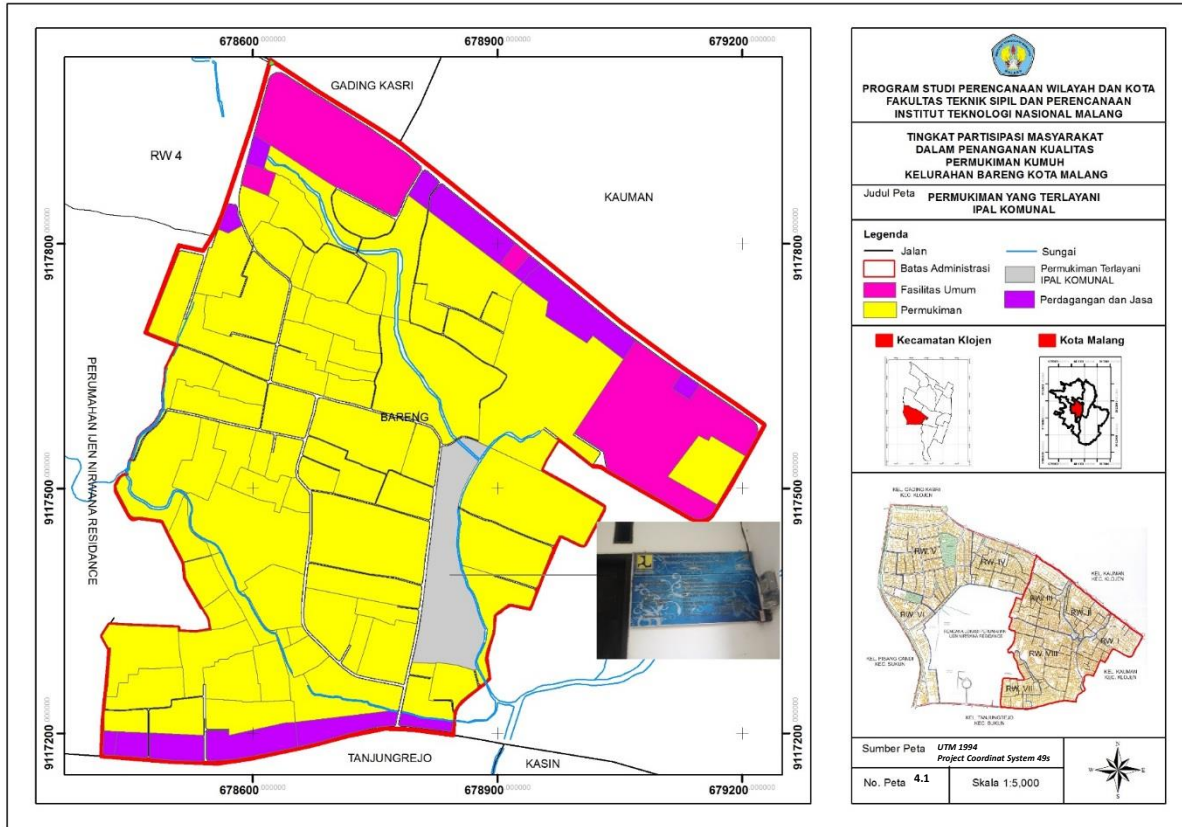
Gambar 4. 8 Gudang Penyimpanan Sampah

Sumber : Hasil Survey, 2017


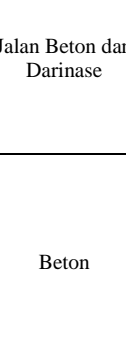
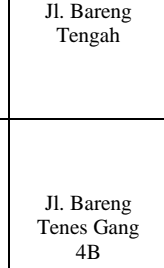


Bank sampah ini menerima sampah yang dapat didaur ulang berupa sampah kering yaitu: kertas, botol (botol dan tutup botol pada bank sampah ini telah dipilah), dll.

4.4.3 Perbaikan Jalan dan Saluran Air (Drainase)

Upaya untuk mewujudkan permukiman kumuh di Kelurahan Bareng menjadi aman dan nyaman bagi warganya yaitu dilakukan dengan memperbaiki sarana prasarana jalan lingkungan. Beberapa perbaikan jalan dan saluran air di Kelurahan Bareng dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.

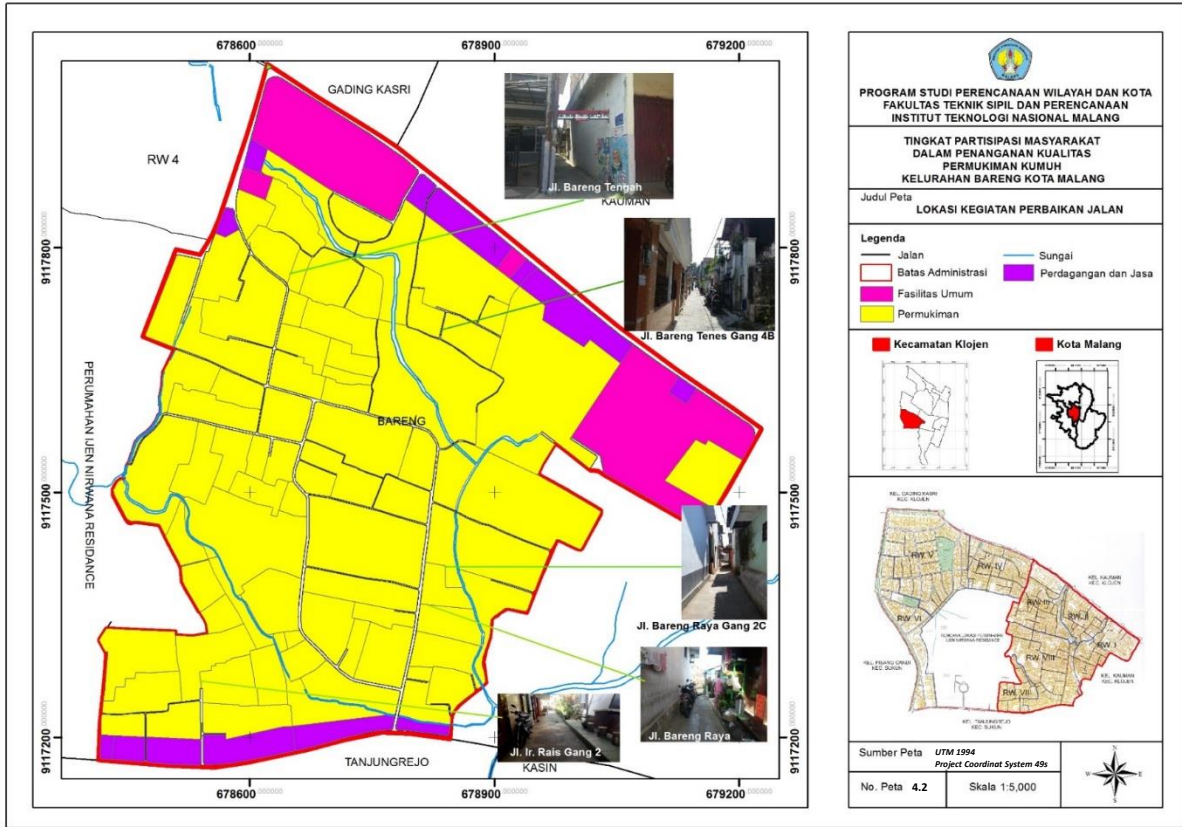


Tabel 4. 4 Perbaikan Jalan

No	Jenis Perbaikan	Lokasi	Foto
1	Beton dan Paving	Jl. Ir. Rais Gang 2	
2	Beton dan Saluran Air (tertutup)	Jl. Bareng Raya	
3	Beton	Jl. Bareng Raya Gang 2C	
4	Jalan Beton dan Darinase	Jl. Bareng Tengah	
6	Beton	Jl. Bareng Tenes Gang 4B	

Sumber: Hasil survey, 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbaikan jalan yang terdapat pada Kelurahan Bareng terdapat pada 6 lokasi jalan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta 4.2

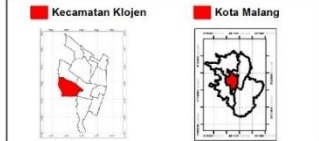



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENANGANAN KUALITAS
PERMUKIMAN KUMUH
KELURAHAN BARENG KOTA MALANG


Judul Peta
LOKASI KEGIATAN PERBAIKAN JALAN

- Legenda**
- Jalan
 - Sungai
 - Batas Administrasi
 - Perdagangan dan Jasa
 - Fasilitas Umum
 - Permukiman



Sumber Peta UTM 1994
 Project Coordinat System 49s

No. Peta 4.2 Skala 1:5,000



4.4.4 Bedah Rumah

Bedah rumah merupakan salah satu kegiatan untuk memenuhi rumah layak huni. Pada Kelurahan Bareng dari hasil observasi lapangan bahwa Kelurahan Bareng belum ada program bedah rumah, dikarenakan rumah milik warga yang tidak layak huni berada pada daerah pinggir sungai dan status tanah merupakan tanah illegal. Tetapi jika dilihat pada kondisi bangunannya rumah yang ditempatin oleh masyarakat memiliki kondisi yang masih memprihatinkan. Kondisi rumah dengan sebagian tembok terbuat dari anyaman bambu dan kayu yang sudah lapuk. Serta memiliki atap rumah yang terbuat dari seng dan genteng. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.9



Gambar 4. 9 Rumah Tidak Layak huni RW 07 RT 01
Sumber : Hasil Survey, 2017

Rumah layak huni sebetulnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kesejahteraan hidupnya. Akan tetapi semua itu tidak dapat terlaksana tanpa adanya biaya untuk menanganinya disebabkan oleh rendahnya penghasilan mereka. Sehingga dibutuhkan bantuan dari pihak lain.

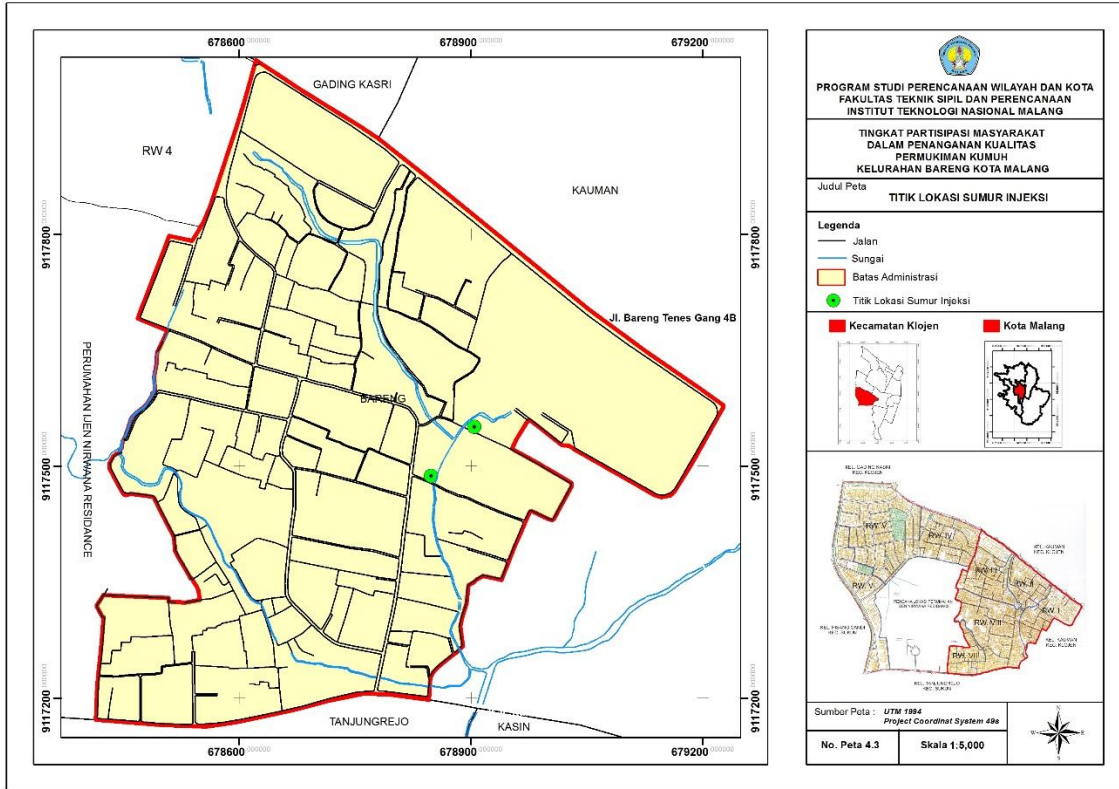
4.4.5 Sumur Injeksi

Sumur injeksi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi genangan sekaligus dapat menyimpan air (konservasi air sama dengan menabung air) yang ramah lingkungan. Banjir merupakan salah satu komponen yang menjadi akibat dari permukiman kumuh. Untuk mengatasi banjir pada Kelurahan Bareng terdapat sumur injeksi sebanyak 2 titik pada RW 08 satu titik dan RW 01 satu titik. Untuk lokasi sumur injeksi dapat dilihat pada peta 4.3



Gambar 4. 10 Sumur Injeksi
Sumber : Hasil Survey, 2017

Sumur injeksi pada kelurahan Bareng yang berada di RW 08 merupakan sumur injeksi yang sumber dananya diperoleh dari CSR BRI.



4.5 Gambaran Umum Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat Kelurahan Bareng dalam program-program penanganan permukiman kumuh berada dalam kondisi yang kurang mengembirakan, dimana masyarakat difasilitasi oleh pemerintah, mulai mengadakan pertemuan-pertemuan lingkungan untuk membahas perkembangan dan permasalahan lingkungannya, namun hanya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat tertentu saja dan tidak meluas ke berbagai lapisan masyarakat lainnya.

Pertemuan-pertemuan lingkungan belum dapat mengakomodasi semua aspirasi masyarakat, termasuk masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh. Dalam tahap pelaksanaan program, masyarakat berpartisipasi dengan turut menyumbangkan tenaga. Sedangkan pemanfaatan dan pengembangannya dilakukan melalui aktifitas sehari-hari. Ilustrasi mengenai tahap pelaksanaan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. 11 Gotong Royong Memperbaiki Drainase dan Pembuatan RTH
Sumber : Hasil Survey, 2017

Sementara itu, anggota masyarakat yang lain mengambil bagian partisipasi dalam tahap pelaksanaan program dan tahap pemanfaatan serta pengembangan hasil pembangunan. Pada tahap perencanaan, masyarakat memberikan usulan melalui pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh anggota kelompok inti masyarakat. Tetapi, ada juga informan yang menjawab memberikan usul dan saran walaupun usulan tersebut kadang diterima atau tidak diterima, dikarenakan usulan tersebut dilihat dari skala prioritas dari penanganannya. Kadang kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat kelurahan pada umumnya agar dapat dirasakan manfaatnya sesuai dengan kondisi yang ada.

4.5.1 Partisipasi Dalam Bentuk Ide

Partisipasi ide dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Bareng meliputi: memberikan usulan/pendapat dalam musyawarah maupun sosialisasi dan terlibat dalam pengambilan/penilaian dari hasil musyawarah yang dilakukan dalam berbagai pertemuan untuk kegiatan program-program penanganan permukiman kumuh. Setiap program-program permukiman kumuh tersebut memiliki bentuk partisipasi masyarakat yang berbeda-beda.

Untuk hasil kuisioner dalam bentuk partisipasi ide dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 5 Partisipasi Dalam Bentuk Ide Dalam Penanganan Permukiman Kumuh

No	Penanganan Permukiman Kumuh	Partisipasi Dalam Bentuk Ide	Tanggapan Responden	Frekuensi
1	Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat	Informasi pelaksanaan kegiatan berupa musyawarah maupun sosialisasi	Tidak	0
			Ada	60
		Memberikan usulan/pedapat/kritik dalam musyawarah maupun sosialisasi	Sering	1
			Kadang-kadang	3
			Tidak Pernah	56
		Usulan/pendapat/kritik diterima	Ya, diterima	3
			Kadang-kadang	1
			Tidak diterima	56
		Terlibat dalam pengambilan/penilaian dari hasil musyawarah dan program	Sering	0
			Kadang-kadang	3
Tidak Pernah	57			
2	Program Bank Sampah	Informasi pelaksanaan kegiatan berupa musyawarah maupun sosialisasi	Tidak	0
			Ya	60
		Memberikan usulan/pedapat/kritik dalam musyawarah maupun sosialisasi	Sering	0
			Kadang-kadang	3
			Tidak Pernah	57
		Usulan/pendapat/kritik diterima	Ya, diterima	0
			Kadang-kadang	0
			Tidak diterima	60
		Terlibat dalam pengambilan/penilaian dari hasil musyawarah dan program	Sering	0
			Kadang-kadang	0
Tidak Pernah	60			
3	Perbaikan Jalan dan Saluran Air (Drainase)	Informasi pelaksanaan kegiatan berupa musyawarah maupun sosialisasi	Tidak	0
			Ya	60
		Memberikan usulan/pedapat/kritik dalam musyawarah maupun sosialisasi	Sering	11
			Kadang-kadang	49
			Tidak Pernah	0
		Usulan/pendapat/kritik diterima	Ya, diterima	4
Kadang-kadang	56			

No	Penanganan Permukiman Kumuh	Partisipasi Dalam Bentuk Ide	Tanggapan Responden	Frekuensi
			Tidak diterima	0
		Terlibat dalam pengambilan/penilaian dari hasil musyawarah dan program	Sering	3
			Kadang-kadang	0
			Tidak Pernah	57
4	Sumur Injeksi	Informasi pelaksanaan kegiatan berupa musyawarah maupun sosialisasi	Tidak	51
			Ya	9
		Memberikan usulan/pedapat/kritik dalam musyawarah maupun sosialisasi	Sering	0
			Kadang-kadang	0
			Tidak Pernah	60
		Usulan/pendapat/kritik diterima	Ya, diterima	0
			Kadang-kadang	0
			Tidak diterima	60
Terlibat dalam pengambilan/penilaian dari hasil musyawarah dan program	Sering	0		
	Kadang-kadang	0		
	Tidak Pernah	60		

Sumber: Hasil Rekapitan Kuisioner, 2017

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada partisipasi dalam bentuk ide masyarakat telah banyak mengetahui informasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh seperti pada program SPBM, tetapi untuk pada tahapan memberikan usulan masyarakat masih kurang dalam memberikan usulan untuk program-program tersebut.

4.5.2 Partisipasi Dalam Bentuk Sumbangan Dana atau Harta Benda

Bentuk keterlibatan masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh bukan hanya keterlibatan secara emosional semata tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud uang yang berguna bagi pelaksanaan penanganan permukiman dalam pelaksanaan pembangunannya. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan berupa uang untuk suatu kegiatan atau program pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk sumbangan dana yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan akan memiliki dampak positif terhadap partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan hasil dari pembangunan itu sendiri sebab dengan ikut terlibatnya mereka dalam memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan dana maka akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab moral terhadap keberhasilan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa di Kelurahan Bareng, keterlibatan masyarakat dalam bentuk kontribusi berupa sumbangan dana untuk membantu membiayai pembangunan telah ada. Tetapi, partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan dana ini masih sedikit, pendanaan dari sumbangan uang tersebut lebih banyak pendanaan dana/biaya pembangunan dari pihak pemerintah maupun pihak luar. Seperti dalam Program SPBM (Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat) lebih besar didanai oleh PNPM SPBM USRI sebesar Rp. 350.000.000,00, sedangkan dari Swadaya masyarakat sendiri sebesar Rp. 5.750.000,-.

Tabel 4. 6 Partisipasi Dalam Bentuk Harta Benda Dalam Penanganan Permukiman Kumuh

No	Penanganan Permukiman Kumuh	Partisipasi Dalam Bentuk Harta Benda	Tanggapan Responden	Frekuensi
1	Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat	Memberikan sumbangan makanan, uang ataupun bahan konstruksi dalam pembangunan MCK dan IPAL	Ya, Pernah	2
			Tidak Pernah	58
		Ada iuran dalam program yang dilakukan	Ya	9
			Tidak	51
2	Program Bank Sampah	Memberikan sumbangan makanan ataupun uang dalam kegiatan bank sampah	Ya, Pernah	0
			Tidak Pernah	60
3	Perbaikan Jalan dan Saluran Air (Drainase)	Memberikan sumbangan makanan atau uang dalam pembangunan jalan dan saluran air	Ya, Pernah	0
			Tidak Pernah	60
		Ada iuran dalam perbaikan jika nanti ada kerusakan dari sarana tersebut	Ya	0
			Tidak	60
4	Sumur Injeksi	Memberikan sumbangan makanan atau uang dalam pembangunan Sumur Injeksi	Ya, Pernah	0
			Tidak Pernah	60
		Ada iuran dalam perbaikan sumur injeksi jika nanti ada kerusakan	Ya	0
			Tidak	60

Sumber: Hasil Rekap Kuisioner, 2017

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada partisipasi dalam bentuk sumbangan harta benda masyarakat masih kurang. Adapun bentuk sumbangan yang dilakukan masyarakat hanya pada program SPBM.

4.5.3 Partisipasi Dalam Bentuk Tenaga

Menurut Sastropetro (dalam Isbandi, 2007:16) mengemukakan pengertian partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Keterlibatan masyarakat yang diberikan untuk menunjang keberhasilan suatu kegiatan program pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu dengan memberikan bantuan dalam bentuk tenaga, partisipasi ini dapat berupa sumbangsiah tenaga yang di berikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat sehingga suatu kegiatan atau program pembangunan dapat terealisasi dengan maksimal dan menunjang suatu keberhasilan untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan hasil kuisioner dan wawancara mendalam di lapangan, didapatkan informasi bahwa selama ini pelaksanaan program/proyek pembangunan mengenai penanganan permukiman di Kelurahan Bareng lebih didominasi oleh pembangunan dalam bidang fisik. Pelaksanaan pembangunan bidang fisik yang dilaksanakan di Kelurahan Bareng dilaksanakan dengan pendanaan dana sebagian besar dari pihak pemerintah maupun pihak luar.



Gambar 4. 12 Kegiatan Gotong Royong Perbaikan Drainase

Sumber: Hasil Survey, 2017

Keterlibatan masyarakat melalui dukungan pelaksanaan pembangunan bidang fisik diwujudkan masyarakat melalui dukungan mereka terhadap setiap proyek/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di lingkungan sekitar mereka, untuk keterlibatan dalam bentuk tenaga (gotong royong) sebagian ada yang ikut berpartisipasi kebanyakan keterlibatan mereka memberikan hanya dalam bentuk tenaga, sisanya ada masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong tersebut yang disebabkan oleh beberapa hal seperti ketersediaan waktu yang dimiliki masing-masing warga yang kurang yang disebabkan kesibukan pekerjaan dari masing-masing masyarakat sehingga sulit untuk bisa ikut serta dalam kegiatan pembangunan. Untuk lebih jelasnya tentang partisipasi masyarakat dalam

bentuk tenaga berdasarkan penanganan permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Partisipasi Dalam Bentuk Tenaga Dalam Penanganan Permukiman Kumuh

No	Penanganan Permukiman Kumuh	Partisipasi Dalam Bentuk Tenaga	Tanggapan Responden	Frekuensi
1	Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat	Mengikuti sosialisasi maupun musyawarah program	Selalu	31
			Kadang-kadang	11
			Tidak	18
		Mengikuti kegiatan dalam pembangunan MCK dan IPAL	Ya, Pernah	45
		Tidak Pernah	15	
2	Program Bank Sampah	Mengikuti sosialisasi maupun musyawarah program	Selalu	60
			Kadang-kadang	0
			Tidak	0
		Mengikuti kegiatan dalam mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat	Ya, Pernah	0
		Tidak Pernah	60	
3	Perbaikan Jalan dan Saluran Air (Drainase)	Mengikuti sosialisasi maupun musyawarah kegiatan	Selalu	16
			Kadang-kadang	44
			Tidak	0
		Mengikuti kegiatan dalam pembangunan jalan dan saluran air (drainase)	Ya, Pernah	8
		Tidak Pernah	52	
4	Sumur Injeksi	Mengikuti sosialisasi maupun musyawarah kegiatan	Selalu	0
			Kadang-kadang	0
			Tidak	60
		Mengikuti kegiatan dalam pembangunan Sumur Injeksi	Ya, Pernah	0
		Tidak Pernah	60	

Sumber: Hasil Rekapitan Kuisisioner, 2017

Dari hasil rekapitan tabel diatas bahwa untuk tanggapa responden dalam bentuk partisipasi tenaga terhadap Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat hanya 47 responden menjawab pernah mengikuti kegiatan dari pembangunan MCK dan IPAL, sedangkan yang tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yaitu pada kegiatan penanganan dengan sumur injeksi.

BAB VI PENUTUP

Pada bab penutup ini terdiri dari kesimpulan serta rekomendasi dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan hasil yang didapatkan berdasarkan fakta-fakta dilapangan dan dihubungkan dengan analisis yang dilakukan. Sedangkan rekomendasi merupakan saran yang menunjukkan sesuatu untuk menguatkan hasil penelitian maupun alternatif yang diajukan penulis.

1.1 Kesimpulan

Fokus utama dalam perencanaan wilayah dan kota ada tiga macam yaitu ruang, sosial, dan ekonomi. Pada penelitian ini berfokus pada sosial masyarakat dalam suatu perencanaan pembangunan, dimana masyarakat sangat berperang penting pada sebuah pembangunan. Sosial masyarakat yang dibahas pada penelitian ini adalah bentuk dan tingkat partisipasi (keikutsertaan) masyarakat dalam suatu program-program pembangunan untuk menangani permasalahan permukiman kumuh. Permukiman kumuh merupakan permasalahan yang selalu dihadapi oleh kota-kota besar maupun berkembang. Tanpa adanya keikutsertaan masyarakat dalam sebuah pembangunan maka pembangunan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan rencana atau berkelanjutan, karena masyarakatlah yang lebih tahu tentang kondisi dari tempat tinggalnya. Adapun program-program untuk menangani permukiman kumuh yang ada pada lokasi penelitian yaitu: program sanitasi perkotaan berbasis masyarakat, program bank sampah, perbaikan jalan dan saluran air (drainase), dan sumur injeksi.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penelitian ini yaitu: partisipasi ide, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, serta partisipasi dalam keahlian.

Partisipasi tenaga berdasarkan hasil analisa bahwa responden dalam kegiatan pembangunan program Sanitasi 75% responden mengatakan ikut serta dalam pembangunan MCK dan IPAL. Sehingga diketahui pada tingkat partisipasi menurut teori Arnstein bahwa Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat termasuk kedalam tingkat tinggi yaitu pada tangga ke enam yaitu Kemitraan. Sedangkan, tingkat partisipasi masyarakat pada penanganan permukiman kumuh yang masih rendah partisipasi masyarakatnya yaitu tangga pertama pada penanganan dengan Sumur Injeksi yaitu Manipulasi dimana masyarakat tidak mengetahui dari kegiatan tersebut. Sedangkan pada partisipasi yang sama yaitu pada tangga ke tiga dengan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat dan Program Bank Sampah, dimana masyarakat aktif dalam menghadiri sosialisasi pada penanganan tersebut.

1.2 Rekomendasi

Untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh yang telah ditulis oleh penulis bahwa penelitian selanjutnya yang dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian ini, peneliti menyarankan membahas tentang faktor-faktor penyebab dari berbedanya tingkat partisipasi masyarakat disetiap program-program penanganan permukiman kumuh, sehingga dapat terlihat apa yang menyebabkan masyarakat memiliki kondisi tingkat partisipasi yang rendah seperti pada kegiatan sumur injeksi.
2. Melakukan penelitian tentang pemberdayaan kepada masyarakat tentang lingkungan permukiman Kelurahan Bareng karena banyak masyarakat yang masih kurang peduli dalam menjaga kebersihan lingkungannya. Itu terlihat dari masih banyaknya masyarakat membuang sampah pada sungai dibelakang rumah.

Tindak lanjut dari penelitian ini adalah untuk pemerintah dan masyarakat yang ada pada Kelurahan Bareng adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah Kota Malang agar lebih memberikan wewenang dan arahan dalam setiap program-program yang dilakukan sehingga partisipasi masyarakat dalam mengikuti program-program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.
2. Untuk masyarakat Kelurahan Bareng, penelitian ini dapat dijadikan acuan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan semakin baik program yang dihasilkan, sehingga perlunya kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan lebih peduli pada lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

Kebijakan

- Kementrian PU Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2012). *Buku Rusunawa-Rusunawa komitmen bersama penangan permukiman kumuh*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Permukiman.
- PermenPUPR No.2. (2016). *Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1. (2010). *Perumahan dan Kawasan Permukiman*.

Buku

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pambaruan.
- Boediono & Koster, W. (2008). *Teori Dan Aplikasi Statistika dan Probabilitas Sederhana, Lugas, dan Mudah Dimengerti*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fahrudin, A. (2006). *Pemberdayaan, Partisipasi, & Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Huraerah, A. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Nalle, M. (2011). *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya Pemberdayaan Panduan Bagi Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sadana, A. S. (2014). *Perencanaan Kawasan Permukiman*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sanoff, Henry. 2000. *Community Participation Methods in Design and Planning*. Toronto: John Wiley & Sons. Inc.

Jurnal

- Adeviyanti, D. (2013). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. *eJournal Administrasi Negara*.
- Aslim, N. d. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Lingkungan Permukiman Studi Kasus: Kampung Pelestarian, Tamansari, Bandung. *Jurnal Temu Ilmiah IPLBI*.
- Fitria, N. &. (2014). Identifikasi Karakteristik Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. *Jurnal Teknik POMITS Vol. 3 No. 2. ISSN 2337-3539*.

- Julimawati. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Permukiman Di Kecamatan Balendah. *Jurnal Pendidikan, Vol. 24, No. 2.*
- Lestari, I. (2005). Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Podosugih, Kota Pekalongan. *Jurnal Teknik PWK Vol. 2 No. 1.*
- Noegroho, N. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Permukiman Kumuh Dikawasan Perkotaan: Study Kasus Kegiatan PLPBK-BK Di Kota Medan Dan Kota Payakumbuh. *Jurnal ComTech Vol. 3 No. 1.*
- Satries, W. I. (2011). Mengukur Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Musrenbang 2010. *Jurnal Kybernan, Vol. 2 No. 2.*
- Wijaya, D. W. (2016). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Studi Penentuan Kawasan Prioritas Untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman Kumuh Kota Malang. *JIAF FIA UB Vol. 2 No. 1 .*

Internet

- Firmansyah, Y. (2015). Blusukan, walikota Malang Imbau Warga Bareng Perbaiki Pola Hidup. *Pemerintah Kota Malang Dinas Komunikasi dan Informatika.*
- Hasyim Basri, I. B. (2010). Model Penanganan Permukiman Kumuh Studi Kasus Permukiman Kumuh Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. *Seminar Nasional Perumahan Permukiman dalam Pembangunan Kota 2010.* Surabaya: Jurusan Arsitektur ITS.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Masyarakat.* Malang: Setara Press.